

BAB IV

HASIL

4.1. Latar Belakang sosok Basuki Tjahaja Purnama



Gambar 4.1 Basuki Tjahaja Purnama
(Sumber: Merubah Indonesia, 2015)

Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih sering disapa Ahok, menjabat Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo yang didaulat rakyat menjadi Presiden Indonesia ketujuh. Ia tercatat sebagai Pemimpin sekaligus Politisi yang *anti mainstream* melakukan reformasi birokrasi pemerintahan untuk mengadministrasi keadilan sosial karena para pemimpin yang selama ini dianggap terlalu protokoler dan birokratis. Politisi yang dikenal sebagai tokoh yang kontroversial ini berasal dari kampung di Belitung Timur, merupakan keturunan Tinghoa-Indonesia, ada realitas baru yang mengejutkan banyak orang ketika nama

mencuat di pentas politik Indonesia. Ahok datang dari genre etnis Tionghoa yang menghendaki pluralisme dalam kehidupan politik. Ia lahir dari generasi yang mendambakan demokrasi di Indonesia steril dari diskriminasi suku, ras, dan agama. Untuk itu Ia tidak ingin terjebak dalam sikap politik yang apatis.

Sosok yang pernah dinobatkan sebagai “10 Tokoh Pilihan yang mengubah Indonesia” pada tahun 2006 oleh majalah Tempo dan sebagai peraih penghargaan BHACA (*Bung Hatta Anti Corruption Award*) saat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Lantas semua penghargaan tersebut, tidak membuatnya mengubah karakternya yang Idealis. Ia tetap dikenal sebagai politikus muda Indonesia yang tegas, berani, aspiratif, blak-blakan, cerdas, emosional, dan jujur. Keberanian dan vokalnya memperjuangkan hak-hak masyarakat mengingatkan banyak orang kepada Soe Hok Gie seorang aktivis Indonesia Tionghoa yang menentang kediktatoran berturut-turut Presiden Soekarno dan Soeharto. Bedanya tentu saja, Ahok langsung terjun ke politisi, sedangkan Soe Hok Gie turun menjadi demonstran (Wibisono dalam Purnama,2008).

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lahir di Manggar, Belitung Timur pada 29 Juni 1966 sebagai keturunan Tionghoa-Indonesia dari suku Hakka. Ahok tercatat sebagai putra pertama merupakan dari Alm. Indra Tjahaja Purnama (Tjoeng Kiem Nam) dan Buniarti Ningsih (Boen Nen Tjau). Anak kedua yaitu Basuri Tjahaja Purnama Bupati Belitung Timur periode 2010-2015, pada tahun berikutnya, dikuti oleh kelahiran Fifi Lety Indra, Harry Basuki dan Frans yang meninggal karena kecelakaan saat remaja. Saat kecil, Basuki Tjahaja Purnama dipanggil Banhok oleh sang ayah. “Ban” berarti puluhan ribu dan “Hok” berarti

belajar. Saat digabungkan keduanya bermakna belajar di segala bidang. Ayahnya ingin Ahok tak pernah berhenti belajar agar menjadi orang sukses. (Shoreamanis,2016,h.3).

Masa kecil Ahok lebih banyak dihabiskan di sekitar Manggar tepatnya di Desa Gantung. Pendidikan dasarnya di sekolah negeri hingga SMA di desa Gantung, Belitung Timur. Walaupun anak pengusaha tambang ayahnya tidak ingin menyekolahkan Ahok dan adik-adiknya di sekolah PT Timah. Dengan sekolah di negeri, Indra Tjahaja berharap Ahok dan adik-adiknya sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan diluar sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Tentu tujuan Indra Tjahaja untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi dan empati terhadap budaya yang berbeda karena Indonesia itu majemuk dan multikultural. Sehingga Ahok diharapkan ayahnya saat dewasa nanti bisa melihat permasalahan dari seluruh sudut pandang (Purnama,2008)

Ahok kecil dan adik-adiknya banyak mendapat pendidikan moral bukan hanya dari sekolah, keluarga juga turut berperan besar dalam pendidikan moral. Hal tersebut diulas dalam buku Hargaku adalah Nyawaku (Santoso, 20015). Anak-anak kecil memperoleh transmisi pendidikan moral, wejangan dan nasehat di malam hari sebelum tidur. Tapi sistem pendidikan yang belaku di keluarga Ahok cukup berbeda. Di kamar tidur, hanya bermain-main seperti kuda-kudaan dengan diselingi soal tanya-jawab. Khusus wejangan dan pelajaran dari Ayahnya dilakukan di Meja makan. Karenanya, Ahok, dan tiga adik kandung, masing-

masing Basuri T. Purnama, Fifi Lety dan Harry Basuki, selalu mewajibkan makan bersama dengan posisi duduk yang sama dari hari ke hari. Indra Tjahaja ayah Ahok memiliki alasan tersendiri menempa mereka dengan wejangan dan pengajaran di meja makan. Indra Tjahaja berpendapat bahwa jika dilakukan di tempat tidur, Ahok dan adik-adiknya cenderung tidak konsentrasi karena sudah bersiap-siap untuk tidur. Sedanglan transmisi pendidikan moral dan wejangan di meja makan akan lebih sempurna karena konsentrasi dan pikiran masih segar (Purnama,2008).

Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, Ahok hijrah ke Jakarta melanjutkan pendidikannya. Ahok sangat mengingat betul pesan Indra Tjahaja, ayahnya tidak akan mewariskan harta berupa uang kepada anak-anaknya. Alasannya, kalau pun diberi uang yang berlimpah dan disebut orang kaya, maka uang tersebut akan lenyap seketika jika dirampok. Tetapi jika mereka terdidik dan memiliki nama naik, maka itulah harta sejati yang tidak bisa diambil oleh siapa pun. Dukungan moral dan usaha sungguh-sungguh guna mendapatkan biaya pendidikan juga dilakukan oleh Ibu Buniarti Ningsuh. Beliau selalu menyisihkan uang untuk dibelikan emas 24 karat sebagai tabungan buat kelak biaya pendidikan anak-anaknya. Hal tersebut ditulis Ahok (Purnama, 2008, h.12)

“Pernyataan yang diungkapkan bapak itu, sangat mengena dihati kami. Itu sebab, kami semua anak-anaknya sangat ‘ngotot’ mengejar ilmu setinggi mungkin melalui pendidikan sekolah. Semangat kami cukup tinggi, melebihi orang tua kami tidak hanya mendoornng secara moral, tetapi juga bersedia berusaha sekuat tenaga untuk membiayai kami sekolah,” Kata Basuki Tjahaja Purnama

“Jika perlu, ’menjual kepala’ pun saya lakukan untuk mendapat biaya sekolah kalian semua,” begitu bapak selalu mengatakan kepada kami putra-putrinya,” Tambahnya

“Bapak tidak mewarisi uang ketika beliau meninggal, tetapi beliau mewariskan” mesin pencetak uang yaitu putra-putrinya. Kami didik untuk meneruskan cita-cita bapak yang belum terwujud ketika beliau masih muda. Salah satunya menjadi pejabat agar bisa melawan oknum pejabat yang penyengsara rakyat”. (Sumber Dokumentasi : Purnama, 2008)

Harapan dan kerja keras kedua orangtua agar kami bisa bersekolah setinggi mungkin, setahap demi setahap terealisasi. Di Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diterima di jurusan kedokteran Universitas Kedokteran Indonesia, namun jurusan tersebut bukanlah kehendak hati Basuki yang ingin menjadi Insinyur pertambangan, melainkan keinginan Ayahnya. Setelah lulus dapat membantu masyarakat di kampungnya. Basuki tidak melanjutkan pendidikan kedokteran dan menulis surat kepada Ayahnya dikampung bahwa ia tidak bisa melanjutkan pendidikan tersebut. Karena tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan. Melalui sepucuk surat, sang Ayah membalas perihal kekecewaannya mengatakan kalau insinyur tak dibutuhkan dikampung halamannya. Warga kampung lebih membutuhkan seorang dokter. Ahok membela diri dengan membalas surat bapak, bahwa jika dia menjadi seorang dokter, maka pasien akan lebih cepat meninggal karena dokternya “kobo” (Purnama, 2008, h.14). Gagal test ujian masuk jurusan pertambangan ITB (Institut Teknologi Bandung). Ahok tidak menyerah dan diterima di jurusan Geologi di Fakultas Teknik Mineral di Universitas Trisakti seperti yang dicita-citakannya ingin menjadi Insinyur Tambang, karena sejak kecil

dirinya memang sudah akrab dengan lingkungan pertambangan di kampungnya Belitung Timur.

Selesai pendidikan dan bergelar Insinyur Geologi, Ahok kembali ke kampung halaman di Belitung Timur dan mendirikan CV Panda yang bergerak dalam bidang Kontraktor Pertambangan Timah. Ahok kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen di Prasetiya Mulya, setelah mendapatkan gelar tersebut, pada tahun 1992 dia kemudian bekerja dibawah naungan PT Simaxindo Primadaya dan menjabat sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek. Pada tahun 1995 Ahok kemudian berhenti bekerja di PT Simaxindo Primadaya dan mendirikan pabrik pengolahan pasir kuarsa pertama di Belitung. Mendirikan PT Nurinda Ekapersada yang memberikan keuntungan 150.000 USD dalam satu tahun jika nilai kurs Rp14.000,00 dan merupakan awal perjalanan dari *Gravel Pack Sand* (Santosa,2015,h.51). Tetapi Ahok terpaksa harus menutupnya karena ia terlibat pertikaian dengan para pejabat yang meminta menanggung keuntungan bersama, namun ia dengan tegas menolak untuk menafkahi para pejabat nakal dan memilih untuk menutup pabrik yang terletak di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar.

Sebagai anak pengusaha yang “vokal” terhadap permainan manipulasi proyek-proyek pemerintahan maupun PT Timah yang dilakukan oleh oknum pejabat dan pengusaha/kontraktor, tentu saja mereka sering “dikerjai” hingga kesulitan keuangan dalam menjalankan roda usaha. Ahok terdidik untuk menegakkan kebenaran walaupun harus sendiri. Melihat Pabriknya ditutup, Ahok

sempat frustrasi melihat perilaku oknum pejabat. Ada kesadaran dalam diri Ahok bagaimana birokrasi pemerintah itu bersih dari pejabat culas. Kebetulan seorang teman di Kanada menawarinya untuk bekerja di negeri benua Amerika itu. Ahok sedang goyah dan putus asa mendapatkan jalan keluar. Ia mengutarakan niatnya kepada ayahnya (Purnama, 2008, h.18). Perdebatan dan adu pendapat pun terjadi, diungkapkan dalam buku Basuki Tjahaja Purnama, Merubah Indonesia:

“Kamu tidak boleh keluar negeri karena rakyat miskin membutuhkan kamu, Hok. Soeharto bisa turun! Indonesia bisa berubah.”

“Apa yang dibutuhkan rakyat dari saya, Pa? Mana mungkin muka minyak babi seperti kita ini bisa jadi pejabat? Wajar Soeharto bisa turun, dan memang pasti turun, sebab dia sudah tua!” Ahok sedikit kesal terhadap sikap ayahnya.

“Kamu dengar baik-baik, kamu lihat saja! Saya mungkin sudah engga bisa lihat kamu. Tapi, suatu hari kelak, rakyat akan memilih kamu untuk membela haknya!” tegas Kim Nam mengunci pembicaraan, dan Ahok pun terdiam. (Purnama, 2008, h.18).

Pasca reformasi 1998, Ahok memutuskan untuk menekuni karir politik meski negeri ini masih bergelut oleh isu-isu primordial. Ia mulai dari kampung halamannya, pada tahun 2004 bergabung dibawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin oleh Dr. Sjahrir. Jabatan yang diterima Basuki sebagai ketua DPC PPIB Kabupaten Belitung Timur. Sebelum memasuki dunia politik sebelumnya Ahok merupakan Ketua Majelis di Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar Yayon II Pluit. Pendeta bahkan teman-teman gereja menilai langkah Basuki sebagai seorang ambisius dengan kekuasaan (Purnama, 2008, h.20).

Di tengah pergolakan batin untuk memilih ke politik atau menjadi ketua majelis di gereja, dengan melihat kesalahpahaman dari pihak di gereja dan rasialismenya para oknum elite politik yang korup dan pengecut tetapi mengobarkan kebencian kepadanya karna Kristen. Satu hal yang dipikirkan Ahok, panggilannya untuk menolong rakyat dengan meniti karir menjadi pejabat adalah hal yang tepat. Jelas menjadi pejabat dengan bisa menolong rakyat banyak agar bisa menikmati pendidikan dan kesehatan yang semakin mahal. Basuki yakin rakyat tidak hanya membutuhkan doa-doa di gereja. Yang dibutuhkan mereka adalah pertolongan nyata agar mereka memiliki jaminan sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan di hari tua di dunia ini (Purnama,2008,h.21).

Vakum dari politik, Ahok tidak hanya berdiam diri, ia menyalurkan pengetahuan politiknya dengan mendirikan *Center for Democracy and Transparency 31* (CDT 31) untuk memprovokasi anak muda agar mau dan berani meniti karir di bidang politik dan pemerintahan (Santoso,2015, h.20). Ia secara khusus mendorong pemuda dan pemudi etnis Tionghoa yang idealis agar mau naik ke pentas politik lokal dan nasional, tidak enggan ataupun segan masuk ke dalam birokrasi, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ahok sempat berada di simpang jalan, sebelum akhirnya dalam Pemilu 2009 berhasil melenggang ke Senayan.

Indra Tjahaja pernah suatu hari mengajak Ahok ke Bandara Udara H.A.S. Hanandjoeddin, pada saat itu ayahnya menjadi kontraktor di Bandara Udara tersebut. Ahok dititipkan kepada teman-teman ayahnya dan ayahnya berteriak lantang di depan teman-temannya bahwa Ahok harus dijaga baik-baik, karena

suatu saat nanti dia akan menjadi Bupati. Spontan teman-teman ayahnya tertawa. Mereka tidak percaya bahwa anak laki-laki bertubuh kurus, berkulit pucat, dan bermata sipit itu akan menjadi bupati, untuk bekerja di pemerintahan saja sangat sulit. Pemerintahan Orde Baru sudah sangat rapat menutup kesempatan bagi orang-orang keturunan Tionghoa untuk bisa terlibat dan bekerja di kantor pemerintah (Santosa, 2015).

Teriakan Indra Tjahaja mungkin juga terdengar “gila” untuk semua orang. Namun itulah yang dalam bahasa Burt Nanus, disebut visi, suatu impian terbaik tentang masa depan. Visi adalah potret masa depan, artikulasi dari arah yang dituju, yaitu sebuah masa depan yang secara hakiki lebih baik, lebih hebat, dan lebih memikat daripada sekarang. Visi adalah hari esok yang divisualisasikan hari ini. Visi bukan realitas, tetapi diyakini akan menjadi realitas. Suatu harapan yang ingin diunduh di hari esok, dan harapan itu tentu saja bukan realitas hari ini. Harapan adalah gambar tentang keinginan, cita-cita atau impian, meski tak jarang sekedar angan atau kesan sumir belaka. Dan berita hebatnya adalah hari cerah di tahun 1971 itu, Indra Tjahaja Purnama sudah melihat impian terbaik tentang apa yang harus dicapai Ahok, apa Yang harus dilakukan (Santoso, 2015, h.17).

4.3. Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama Sebelum Menjabat Menjadi Gubernur DKI Jakarta

4.3.1. Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua DPC Partai PIB

Perjalanan serta keterlibatan Ahok untuk menekuni karir politik dimulai dari daerah kelahirannya Bangka Belitung ketika ia bergabung dengan PPIB (Partai Perhimpunan Indonesia Baru) yang sedang melakukan ekspansi dengan

melakukan penjaringan kader partai. Nama Ahok mencuat di pentas politik Indonesia datang dari etnis Tionghoa yang menghendaki pluralisme dalam kehidupan politik. Ia lahir dari generasi yang mendambakan demokrasi di Indonesia steril diskrimasi suku, ras, dan agama. Ia tidak ingin terjebak dalam sikap politik yang apatis (Santoso, 2015, h.15)

Dibawah naungan bendera Partai PIB (Perhimpunan Indonesia Baru), Ahok didaulat menjadi Ketua DPC (Dewan Perwakilan Cabang) Bangka Belitung yang saat itu dipimpin oleh Dr. Sjahrir. Sebelumnya ia merupakan Ketua Majelis Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar Yayon II Pluit di tengah pergolakan batin, Ahok terlanjur jatuh hati untuk masuk dunia politik. Karena panggilannya untuk menolong rakyat. Ahok yakin rakyat tidak hanya membutuhkan doa-doa di gereja, yang dibutuhkan mereka adalah pertolongan nyata agar mereka memiliki jaminan sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan di hari tua di dunia ini (Purnama, 2008, h.20).

Banyak orang mulai mencibirnya bahwa ia terlalu ambisius. Gila dan tak tahu diri. Banyak orang meragukannya karena ia adalah orang yang terlanjur diberi label minoritas, beragama Kristen dan bermata sipit. Tak boleh menjadi pemimpin (Randan,2014,h.36). Namun Ahok berkisah bahwa keputusannya untuk bergabung dengan Partai PIB antara lain disebabkan oleh rasa tak puas karena hanya bertindak sebagai penonton dalam kancah politik, sebagaimana dikatakannya dalam buku Politik Akal Sehat (Shoeramanis,2016).

“Kita tuh enggak cukup Cuma jadi penonton. Ibarat orang main bola, kita komentator nih, selama ini kita di atas gitu loh, kita di

bangku penonton. Eh...pemainnya kurang ajar. 'Eh lu jangan cuma ngomong dong. Kalau mau, lu turun lawan kita'. Gitu deh kurang lebih pemainnya ngomong ke kita. Kita kasih tahu cara main yang baik tuh gimana, dia engga mau dengerin, ya udah kita turun saja, kan? Mulai PPIB rekrut orang-orang. Lalu, apa itu Politik Akal Sehat? Misalnya kita pakai kaus 'Si XY Presidenku.' Orang minta kaus, kita enggak kasih. Terus dia enggak mau pilih, kan? Ya biarin! Nah, jadi konsepnya, yang pertama itu, kita ini bukannya menipu rakyat supaya memilih kita, tetapi kita mendidik rakyat untuk memilih pejabat yang jujur. Konsep kedua, kita mempertontonkan diri ke orang-orang, kita jadi showcase gitu, kita tunjukkan kerja kita."

Terpilih sebagai Ketua DPC Partai PIB, Ahok mengemban tanggung jawab mendidik rakyat agar mampu memanfaatkan pesta demokrasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau *bonum commune*. Strategi pertama dimulai dengan memerangi praktik korupsi dalam tubuh partai menjadi satu tugas pertama yang dihadapi Ahok pada saat menjelang kampanye saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD perwakilan Belitung Timur. Dengan keuangan yang sangat terbatas dan model kampanye yang lain dari yang lain, yaitu menolak memberikan uang kepada rakyat (*money politics*). Disebuah dusun, Ahok harus menolak permintaan uang dua puluh ribu rupiah per orang agar partainya dipilih. Di dusun yang lain, sudah ada banyak memasang bendera PPIB, bahkan ada sejumlah orang yang menjadi anggota partai. Hingga suatu hari kepala adat dusun itu mendatangi Ahok untuk meminta uang empat juta rupiah. Tentu saja Ahok menolak, dan karena mereka menerima uang dari partai lain, seluruh bendera PPIB pun diganti bendera partai 'donatur' (Purnama, 2008, h.30).

Bahkan para pengurus rumah ibadah juga datang memanfaatkan kesempatan menjelang pemilu dengan datang kepadanya melakukan permohonan sumbangan pembangunan dengan melakukan istilah yang implisit;

“Apa yang akan diberikan oleh partai saudara yang merah?Atap seng ini dari yang warna hijau, semen sudah dari yang kuning. Kami akan bagi suara kami ke partai yang telah menyumbang” kata pengurus rumah ibadah.

“Kalau begitu bapak salah mengundang saya, toh masih ada belasan partai lainnya. Minta kesana saja. Tetapi jika pemilu usai, rumah ibadah ini masih belum terselesaikan, maka bapak boleh cari saya. Masalah akan diberikan atau tidak, itu urusan saya dengan Tuhan.” Ahok menjawab secara diplomatis

Ketika akan memasuki masa proses verifikasi, sudah ada oknum pengurus partai yang menuntut diberikan perahu motor, tentu saja untuk kepentingan sendiri. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi mereka mengancam, ia bersama semua anggota partai wilayahnya akan mengundurkan diri dari PPIB. Ahok sedikit terkejut. Ini akan berakibat buruk, PPIB bisa tidak lolos verifikasi KPUD. Tetapi, Ketua Partai DPC PPIB Belitung Timur tersebut bukan orang yang mudah berletut pada ancaman. Ahok menjadi orang partai dengan satu motivasi kuat untuk memberantas korupsi. Ia tidak akan akan memelihara “anak macan” yang lapar rasuah. Intimidasi pengurus partai itu sudah merupakan benih korupsi yang harus dimatikan. Ahok tegas menolak tuntutan itu. Ancaman itu juga tidak hanya gertakan, pengurus partai dan orang-orangnya pun meninggalkan PPIB. Ia bersama rekan-rekan pengurus DPC PPIB yang lainnya harus bekerja ekstra keras. Mereka mendekati dan menjaring anggota partai baru, dan setelah melakukan revisi daftar anggota partai, PPIB dinyatakan lolos verifikasi oleh

KPUD Belitung Timur, dan berhak menjadi kontestan Pemilu 2004 (Shoeramanis,2016,h.68).

Persoalan lain juga muncul, ketika Ahok dan kawan-kawan PPIB merancang model kaos yang dicetak bervariasi kepada anggota dan simpatisan. Ada beberapa model dan warna yang berbeda tanpa diduga sebelumnya, kaos partai yang banyak ragamnya justru memicu persoalan di lapangan saat kampanye. Imbasnya banyak oknum pengurus partai yang ingin memiliki semua model kaos tersebut (Purnama, 2008,h.27). Tentu saja tindakan tersebut tidak diindahkan Ahok. Persoalan baju ini pun kemudian ternyata bisa menjadi pemicu mereka yang tidak mendapatkan semua model kaos menyatakan keluar dari partai. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat para pengurus dan anggota yang tetap setia. Dari hal ini Ahok menemukan realitas bahwa tidak hanya orang-orang partai dan elite politik saja yang korup. Sekelompok masyarakat tertentu juga korup. Ada massa yang korup di tengah-tengah rakyat yang sedang mengharapkan perbaikan hidup (Santoso,2015, h.67).

Selama kampanye Ahok sudah bertekad melakukan pendidikan politik kepada rakyat, tidak semata-mata mencari suara di kursi DPRD Beltim. Ia ingin membangun paradigma yang saling membutuhkan antara konstituen dan calon legislatif. Pendidikan politik tersebut diberikannya di podium mini yang dibangun di tengah lapangan sepak bola di dusun itu. Siang hari itu di lapangan sepak bola sudah dipadati orang-orang yang meneriakkan yel-yel, "*Hidup PPIB! Hidup! Merdeka! Merdeka!*" Basuki dari atas podium justru membalas teriakan peserta

kampanye itu dengan seruan yang tidak kalah kerasnya, spontan peserta kampanye, simpatisan ataupun anggota partai terperangah;

“Goblok!Goblok!Goblok! Kalian mendukung partai saya tanpa peduli, bahkan tanpa mengetahui apa ideologi partai saya yang penting karena sudah banyak mendapatkan bantuan (Santosa, 2015, h.72)”

”Coba bayangkan harga baju kaos bola yang hanya Rp15.000,-, mereka telah rela memberikan nasib mereka dan anak cucu kepada partai saya. Bayangkan Rp15.000,- kalau dibagi 5 tahun/bulan mereka baru bisa mendapatkan RP250 per bulan. Sedangkan saya bisa memperoleh sekian juta rupiah. Di tambah jika saya tidak memperjuangkan jaminan sosial untuk mereka di APBD, maka mereka akan “dirampok” oleh biaya kesehatan, pendidikan dan modal kerja (Purnama,2008,h.31).

Dalam *scene* diatas, ketegasan dan kelugasan bahasa Ahok dalam berbicara menjadi karakter dan citra dirinya melalui tindakan (*act*) menolak keberpihakan kepada oknum yang memanfaatkan kesempatan pada masa kampanye, dilakukan dalam dua strategi yaitu menolak memberikan bantuan uang pada saat masa kampanye akan membuka hati nurani masyarakat dan memberikan pendidikan politik dengan memerangi praktik korupsi dalam tubuh partai. Bertujuan (motif) mengajarkan masyarakat untuk menghargai pesta demokrasi dalam pemilu menganggap pentingnya kejujuran dalam menaikkan kelas demokrasi di Indonesia sebagai salah satu pendidikan politik. Ahok sadar dengan memberikan segala yang dibutuhkan masyarakat dan menggelontorkan uang dan janji-janji untuk memberikan bantuan, niscaya PPIB akan meraup banyak suara di Beltim, namun di lain sisi ia prihatin melihat fenomena transaksional seperti ini. Jika seorang calon legislatif menjadi anggota DPRD itu karena konstituen memilih untuk mendapatkan sesuatu, tentu saja konstituen

akan menuntut dan menagih janji caleg pasca pemilu. Jika tuntutan konstituen tersebut tidak dipenuhi, masyarakat akan merasa ditinggalkan, bahkan merasa dilupakan karena Pemilu sudah berlalu dan sang caleg sudah duduk manis di kursi parlemen (Santosa,2015,h.70).

Melalui *scene* diatas memperlihatkan citra diri Ahok yang esentrik dan *ceplas-ceplos*. di situ ia nampak marah dan dengan lugas menyampaikan orasinya (*agency*). Tentu saja orasi Ahok yang meluap-luap membuat peserta kampanye PPIB merah telinga. Mereka beramai-ramai menjauh dari podium, dan meninggalkan arena kampanye dengan panas hati. Mereka marah, tetapi kaos partai tetap diambil, dan kemenangan partai di dusun tersebut pun raib (Santosa,2008,h.73). Penggunaan diksi ‘Goblok’ yang dianggap kasar, tidak ada sama sekali ungkapan manis yang keluar, teriakan Ahok lantas membuat masyarakat marah. Tentu saja tujuan (motif) Ahok melontarkan kalimat sindiran “Kalian mendukung partai saya tanpa peduli, bahkan tanpa mengetahui apa ideologi partai saya.” Ada keinginannya agar masyarakat cerdas memilih pemimpin yang menjunjung keadilan sosial. Sehingga para calon kepala daerah lain yang berkualitas nantinya bisa bertanding secara *fair* tanpa terikat dengan politik transaksional.

4.3.2. Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama sebagai pendiri *Center For Democracy and Transparency (CDT 31)*

Gagal dalam Pilkada Babel, Ahok kembali menjalankan perusahaan yang cukup lama ia tinggalkan. Namun, itu tidak berarti ia menjauh dari kegiatan

politik, Ahok justru mulai menjejakkan karir politik di tingkat nasional. Pada Juni 2007, Ahok diangkat menjadi Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB). Namun, dinamika dan persoalan internal partai membuatnya tidak lama menjabat sebagai sekjen. Ia melepas jabatan itu dan mundur dari Partai PIB. Ahok kemudian mendirikan lembaga kajian *Center for Democracy and Transparency 31 (CDT 31)*. Lembaga ini memfokuskan kajian pada opini publik, terutama yang terkait dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah langsung (Santoso,2015,h.107).

Melalui *Center for Democracy and Transparency 31 (CDT 31)*. Ia menyalurkan pemikiran politiknya untuk memprovokasi anak muda agar mau dan berani meniti karir di bidang politik dan pemerintahan. Ia secara khusus mendorong pemuda dan pemudi etnis Tionghoa yang idealis agar mau naik ke pentas politik lokal dan nasional, tidak enggan ataupun segan masuk ke dalam birokrasi, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ahok yakin, jika pemuda dan pemudi Tionghoa yang idealis mau memasuki arena politik, mereka bisa membuat Indonesia hebat. Orang-orang muda yang bersih, transparan, dan profesional akan membuat Republik ini menjadi tangguh. Ahok meyakini kata-kata bijak Plato, bahwa orang yang menolak memimpin biasanya akan dipimpin oleh orang yang lebih buruk darinya. Seperti yang dikatakannya berikut ini:

“Saya sendiri bersedia diutus. Jika semua berkata,”Ini aku, utuslah aku!” maka tidak sampai dua puluh tahun ke depan kita mungkin bisa menemukan data pribadi Presiden Republik Indonesia yang beragama bukan Islam, bukan suku Jawa, dan orangtua atau kakeknya masih bernama’tiga huruf.”(Purnama,2008,h.42)

CDT 31 tidak terlepas dari pengalaman Ahok selama terjun dalam politik. Ia banyak belajar dari perjalanan politik sejak mendaftarkan diri menjadi anggota partai, menjadi ketua DPC dan memimpin PPIB di Belitung Timur, sampai ikut dalam Pilkada Belitung Timur dan Pilkada Bangka Belitung bertekad untuk menjaring pemimpin lokal yang kredibel dan mendidik rakyat untuk memilih dengan akal sehat, bukan berdasarkan pertimbangan SARA. Itulah yang melatarbelakangi berdirinya CDT 31. Lembaga kajian ini ingin menjadi agen sekaligus promotor yang terlibat aktif dalam mempromosikan lahirnya pemimpin muda yang bersih, transparan dan profesional (Santosa,2015,h.109).

Tujuan (motif) dari tindakan (*act*) Basuki Tjahaja Purnama adalah untuk menyelenggarakan substansi keadilan sosial, menegakkan pilar demokrasi tanpa memandang latar belakang RAS, sehingga lapangan tanding para calon kepala daerah rata (seimbang) di Pemilu. Jika terus melihat perbedaan maka hal itulah menjadi titik lemah dari bangsa yang dapat dimanfaatkan orang sebagai perpecahan kesatuan Indonesia.

Hal tersebut juga sudah ditegaskannya saat menjabat menjadi Bupati Belitung Timur. Merupakan catatan sang sekretaris atas pidato sambutan tanpa teks dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2005, berikut ini:

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Pagi hari kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, 77 tahun yang lalu, pemuda-pemudi kita dengan berani bahkan sangat gagah berani mau melepaskan suatu kebanggaan pribadi, kesukuan atau keegoisan dari kaum mayoritas untuk menerima suku-suku kecil untuk disatukan menjadi bangsa Indonesia. Dimana suatu resesi Yong Java, pemuda Jakarta mau menerima Yong Ambon, Yong Bangka mau menerima Yong Batak

dan Yong-Yong yang lainnya dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda untuk mewujudkan Indonesia bersatu.

Saya yakin, kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak akan terjadi kalau tidak ada sekelompok pemuda yang ikhlas melepas keegoisannya. Saya bayangkan jika kita ditempatkan pada posisi saat itu, apakah kita ikhlas disatukan dalam satu suku bangsa. Kita ambil contoh di pilkada, kalau menerima pegawai harus putera asli daerah. Jika hal itu sampai terjadi 77 tahun yang lalu maka Sumpah Pemuda tidak akan terwujud, karena masing-masing masyarakat bersikap “Saya Mau Suku Saya.”

Pada masa revolusi kemerdekaan, senjata yang didapat dari Jepang atau Belanda sangat tidak memadai untuk berperang, dan pada saat yang sama tidak pernah ada kejadian, para pemuda saling baku tembak, saya coba bayangkan kembali kalau kita berada pada waktu itu.

Saya adalah suku yang kuat, maka saya akan membekali diri saya dengan senjata otomatis. Sedangkan suku yang kecil hanya menggunakan senjata bambu runcing. “Hei kamu suku kecil kamu saya bayar saja dan saya pelihara kamu. Jika hal itu terjadi maka Belanda tidak perlu menembakkan satu peluru pun tapi cukup menonton karena sudah saling baku hantam dan baku tembak sesama kita. Maka dari itu kemerdekaan tidak akan terwujud.

Untuk itu, kita yang berada di kehidupan sekarang patut bersyukur dan mengisi kemerdekaan dengan mengamalkan Pancasila. Kita bangun bangsa ini dengan pondasi yang kuat dan kokoh sebagaimana yang dicetuskan para pemuda terdahulu. Kita bangun Indonesia dengan pondasi Pancasila.

Saya yakin dengan peringatan Sumpah Pemuda ini, kita jadikan momentum ini untuk mewujudkan Bangsa Indonesia bangsa yang besar.

Berkaitan dengan ini, para pemuda sekarang harus membangun bangsa ini dengan belajar teknologi dan lain sebagainya. Karena belajar merupakan transisi menuju kesuksesan.

Dan yang terpenting untuk membangun bangsa ini tidak harus melihat suku, agama, ras tapi lihatlah kita sebagai satu bangsa yaitu Indonesia. Mari kita perbaiki diri, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Indonesia ke depan dapat jaya. Sebagai pemuda, mari kita menjadi teladan contoh dalam membangun bangsa. Demikian, sekian dan terimakasih.

Kemudian, Ahok mengatakan bahwa sebaiknya orang jangan bersikap acuh tak acuh terhadap politik. Semua warga punya ruang untuk berkiprah di dalam politik. Ahok menyampaikan pidatonya dengan gaya khas; Meledak-ledak, terlihat garang dan bersemangat diikuti intonasi yang tinggi dalam Buku Politik Akal Sehat (Shoreamanis,2016,h.18)

“Anda harus masuk ke politik supaya orang yang sudah sadar politik, cerdas politik, punya pilihan. Jadi, golput itu bodoh. Nolong dia milih orang jelek ya juga *****(Ahok mendamprat), yang kita pilih juga setan, mungkin kan gitu? Kita jadi susah. Nah, Anda harus terjun. Kalau Anda terjun, Anda harus sadar, Anda nih pejuang. Dulu kita melawan penjajah, bangsa bule, Belanda, sekutu. Sekarang kita malawan para koruptor. Kalau anda tidakpuas dengan pemerintah saat ini, Anda Cuma ngedumel, ngomong-ngomong doang, itu Anda setengah dosa karena Anda tidak pernah mau terjun ke politik. Jadi timses tidak dibayar, itu juga menolong orang jujur untuk berpolitik, kan? Jadi, satu, Anda sendiri nih maju, masuk politik. Dua, Anda membantu orang yang mau terjun. Yang ketiga aatu yang paling rendah, memilih orang berdasarkan rekam jejak bukan berdasarkan primodialisme, suku, agama, ras, gitu, lho. Itu penting.”

Dengan membangkitkan semangat juang pemuda-pemudi Ahok menuturkan hal yang sama dalam menanggapi pertanyaan lawan bicaranya Peter Gotha, Dubes Indonesia untuk Polandia pada tahun 2014, mengenai aspirasi Ahok untuk mengajak generasi muda untuk turut berpartisipasi dalam menaikkan kelas demokrasi Indonesia. Ia menanggapi pertanyaan tersebut dalam program stasiun televisi QTV (2008) yang berjudul ‘Bersama Ir. Basuki Tjahaja Purnama,MM’ dengan penggunaan bahasa yang lugas dan diplomatis berikut ini:

“Saya ingin melihat ada orang-orang idealis para aktivis mari masuk ke DPRD dimulai dari tingkat II, karena ini jalur yang terbaik. Kita tidak usah teriak-teriak di luar. Mungkin 500 orang akan memilih, anda sudah dapat kursi DPRD. Tetapi

begitu di dalam mari kita tunjukkan kita berbeda. Saya harapkan anak muda pada tahun 2009 muncul untuk menjadi DPRD.” (Youtube, 27 Juni 2008)

“Setelah saudara-saudara duduk menjadi anggota DPRD, akan dipaksa menjadi ‘Robin Hood’ yang mencuri dari APBD, yang mencuri dari APBD, atau memeras orang kaya untuk bisa menghidupi konstituen pemilih, Bahkan yang tidak memilih saudara, setelah saudara duduk, mereka mengaku memilih saudara dan meminta jatah rezeki saudara.” (Youtube, 27 Juni 2008)

Melalui pidatonya yang menggairahkan dan narasi yang dia bangun melalui argumen-argumen yang disampaikannya melalui media nasional (*agency*). Motif serta tujuannya tidak lain ingin mendorong semangat idealisme kaum muda untuk menjadi pelaku politik yang cerdas bukan hanya penonton apatis. Setelah para pemuda idealis tadi menemukan partai politik, Ahok menyarankan mereka memulai karir politik dari kampung halaman, dan menjadi calon legislatif yang bersih, jujur dan profesional. Tidak menghalalkan cara-cara haram, yang mementingkan kemenangan. Sehingga dapat disimpulkan tindakan (*act*) Basuki Tjahaja Purnama mendirikan CDT 31 tersebut menegaskan SARA bukan sebagai faktor utama untuk memimpin, tetapi benar-benar kapabel dan memiliki integritas. Perlunya pendidikan politik sebagai pilar menegakkan demokrasi akan menghasilkan pemimpin yang tidak hanya vokal dan berani tetapi juga visioner dan memiliki kinerja yang berkualitas dan etis.

Pada tahun 2008 lewat lembaga non pemerintah (NGO) yang didirikannya yaitu *Center for Democracy and Transparency* (CDT31), Ahok sempat diundang sebagai pembicara dalam *Forum International Visitor Leader* di Washington DC yang juga merupakan rangkaian kampanye Barack Obama, yang ketika itu masih

menjadi calon presiden. Kemampuannya berbahasanya yang fasih inggris dan mandarin bukan tidak mungkin dirinya dilirik negara lain untuk diundang menyampaikan gagasannya. Ahok diundang karena pemikirannya tentang gagasan tentang demokrasi untuk mendidik rakyat dalam memilih pemimpin melalui sistem pilkada dengan mengajak rakyat memilih pemimpin yang Bersih, Transparan dan Profesional (BTP) tanpa SARA. Ahok memang dikenal suka bercerita, menceritakan kembali pengalamannya melalui pidatonya maupun saat sedang pertemuan. Hal tersebut diungkapkannya saat sedang melakukan pertemuan dengan rombongan mahasiswa di gedung Balai Kota Jakarta dan diunggah melalui akun YouTube Pemprov DKI (2016).

Dalam prosesnya Ahok melakukan perlawatan ke luar negeri selama 3 minggu di negeri Paman Sam tersebut, pertemuan dengan senator Amerika Serikat (AS) yang sempat menyombongkan negaranya di hadapan para pemuda dari beberapa negara yang diundang, tak terkecuali Ahok. Menurut Ahok, senator tersebut sempat berujar kepada pemuda dari Korea Selatan dan Jepang bahwa keamanan negara mereka dalam bahaya jika Pemerintah AS menarik pasukannya dari kedua negara tersebut dan sampai tiba giliran Ahok. Saat mengetahui Ahok berasal dari Indonesia, senator itu kemudian meminta agar Indonesia banyak belajar demokrasi dari AS. Apa Indonesia? Kalian harus belajar demokrasi sama kami (AS),” ujar ahok menirukan ucapan sang senator. Ketika merespon ucapan itu, Ahok mengaku langsung menanyakan kepada si senator apakah mereka masih akan memilih Obama jika si capres beragama Islam, agama minoritas di Amerika. Senator tersebut menjawab “tentu saja tidak”. Kepada senator tersebut ia

membanggakan kampungnya Belitung Timur yang pernah memilihnya menjadi Bupati. Ahok mengatakan, 93 persen penduduk Belitung Timur beragama Islam yang dipilih justru saya keturunan China dan Kristen,” kata Ahok. Tak mau kalah si senator kemudian membanggakan bahwa negaranya memiliki prinsip menjunjung perbedaan yang dicantumkan dalam tulisan “*e pluribus unum*” kalimat tersebut tercantum dalam pita yang digigit burung elang yang menjadi lambang negara Amerika Serikat. Ahok kemudian menyatakan bahwa Indonesia juga punya lambang negara yang juga melambangkan prinsip menjunjung perbedaan, yakni burung Garuda yang mencengkram pita bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika". Kepada senator itu, Ahok mengatakan bahwa burung Garuda lebih unggul karena pita dibawa dengan cara digenggam, bukan digigit. "Artinya apa, burung elang Amerika kalau lapar pitanya dilepas. Jadi kalian orang Amerika pragmatis. Kalau bangsa kami, Bhinneka Tunggal Ika-nya sebagai pondasi yang begitu penting sehingga jadi pegangan burung Garuda, karna kami (Indonesia) terdiri dari etnis suku dan ribuan bahasa tetap harus bersatu" kata Ahok (Rudi,2016).

4.3.3. Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama Saat Menjadi Anggota DPR Republik Indonesia

Dalam pemilu legislatif 2009, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju sebagai calon legislatif dari Partai Golkar. Selama di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Ahok duduk di Komisi II. Dikenal oleh kawan dan lawan sebagai figur yang apa adanya, vokal dan mudah diakses oleh masyarakat banyak. Lewat

kiprahnya di DPR RI dia menciptakan standar baru: Anggota-anggota DPR semestinya bersikap bersih, transparan, dan profesional (BTP).

Komisi II adalah tempat yang tepat bagi Ahok dalam memperjuangkan aspirasi rakyat mengingat sebagai ‘orang kampung’ melihat banyak permasalahan kualitas aparatur dan birokrasi pemerintahan. Ahok duduk di Komisi II yang mengurus masalah pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Komisi ini bermitra dengan Departemen Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Basuki juga dipercaya jadi anggota Badan Legislasi (Baleg) sebuah badan kelengkapan DPR yang bertugas mengurus semua masalah legislasi atau perundang-undangan (Santoso,2015,h.113).

Ahok dikenal sebagai anggota Komisi II DPR RI yang ‘vokal’ di dalam menyerukan narasi politiknya. Ahok memang dikenal sebagai salah satu politisi yang aktif memberikan kritik dan argumen kontroversial tentang mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dibalut gaya berbicara langsung ke sasaran, tanpa basa-basi (*to the point*), provokatif bahkan terkadang lebih mengarah ke sarkasme. Kritik pedas tersebut dilontarkannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu (2011). Sebagai mana yang dikatakan Basuki Tjahaja Purnama kepada peserta rapat berikut:

“Seharusnya KPU itu membuat suatu usulan, yang menjadi persoalan selalu dikatakan bargaining calon independen menjadi masalah, KPU ada main dengan petahana segala macam. Ujung-ujungnya pemerintah, bapak tau kan sekarang pemerintah terutama

Partai Demokrat pak, itu terang-terangan mengatakan Gubernur akan dipilih oleh DPRD, mungkin selanjutnya Walikota, Bupati. Nah saya kan juga bersyukur berarti 600-800 miliar anggaran bisa kita potong dari komisi II. Untuk itu untuk apalagi ada KPU dan Bawaslu. Tetapi yang namanya demokrasi tidak seperti itu pak, pemerintah mengatakan habis uang banyak, saya katakan pemerintah tidak substantif. Ini salah KPU dan Bawaslu!

Tolong bikin terobosan dong pak! yang menjadi masalah itu dimana? Sekarang pemerintah juga lucu-lucu dulu mesti ada syarat birokrasi, sekarang ga boleh ada dinasti segala macam, saya kira itu betul tetapi melanggar HAM. Tetapi yang substantif mereka tidak bicarakan, yang kita tidak mau itu kan kalau si koruptor itu yang menjadi kembali pak, yang kita tidak mau ini, pencuri-pencuri uang ini..bos-bos gelap ini yang tidak membayar pajak, membayari orang ini yang menjadi kepala daerah dan KPU, Bawaslu tidak bisa mencegah ini. Maksud saya harus bikin terobosan.

Di dalam alam demokrasi, yang buruk sama yang baik ini punya peluang yang sama untuk terpilih. Nah itulah tugas bapak-bapak dan ibu-ibu disini, bagaimana yang buruk-buruk ini jangan terpilih karena lapangan tidak rata. Tugas bapak meratakan lapangan, saya selalu bermimpi, para aktivis yang idealis ini 2014 bisa masuk ke politik ini tanpa dicurangi pak!

Saya sudah pernah mengalami pak, lalu bagaimana saya bisa duduk disini pak? (DPR RI Komisi II) karena kemudian kalian mendokumentasikan semua hasil suara saya, mereka tidak berani main pak. Saya menang 44%, maka itu duduklah saya di DPR RI, nah pertanyaan saya kenapa bawaslu tidak mau foto? Maksud saya apakah Bawaslu dan KPU tidak begitu ngerti urusan yang begitu murah dan saudara lakukan! Ini untuk mencegah maling..maling yang mau jadi pejabat! Supaya aktivis yang idealis ini bisa bertanding yang sama.” (Youtube, 11 Februari 2011)

Melalui *Scene* diatas menunjukkan argumen kritis Ahok kepada KPU dan Bawaslu yang dianggapnya lamban dalam menyelesaikan masalah teknis yang sering terjadi di lapangan. Penggunaan diksi ‘*Tolong bikin terobosan dong pak!*’, memperlihatkan suatu penekanan. Ia ingin menunjukkan bahwa perlunya meningkatkan kinerjanya untuk melakukan terobosan upaya menghindari

kecurangan dalam pemungutan suara, kedua membuat aturan jelas untuk calon yang maju independen sehingga tidak menutup kemungkinan PNS-PNS jujur dan Aktivistis yang ideologis bersaing secara sehat tanpa politik uang. Argumen Basuki tersebut sebagai tujuan untuk meningkatkan nilai demokrasi di Indonesia. Sesuai cita-cita sewaktu mendirikan CDT 31, untuk membuat iklim perpolitikan yang kondusif di mana individu-individu yang idealis dan bersih, transparan dan profesional serta mampu bersaing secara sehat.

Dikeempatan lain saat melakukan kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi, untuk meninjau masalah pertahanan, kependudukan dan pemekaran daerah. Basuki dihadapkan pada pilihan yang tak menyenangkan. Ketika seorang staff menawarkan kepadanya untuk memilih tiket pesawat ekonomi atau eksklusif. Menurut peraturan yang berlaku, setiap anggota dewan dalam kunjungan kerja mendapat biaya dengan sistem *lum sum*, uang tiket eksekutif atau bisnis, uang saku, uang hotel semua dihitung dengan standart tertinggi di kota yang dikunjungi (Santosa,2015,h.115).

Basuki berpikir untuk melakukan penghematan dengan memilih kelas ekonomi dan selisih dari harganya ia kembalikan ke kas negara. Faktanya, anggota dewan meraup keuntungan dari selisih harga tiket. Basuki merasa risih dengan hal tersebut, ia kembali mengkritik tindakan anggota dewan.

“Dari sisi penghematan uang negara, saya setuju, anggota kalau melakukan perjalanan dinas sebaiknya tiket yang akan digunakan berada di kelas ekonomi, tapi faktanya adalah anggaran yang tersedia justru untuk kelas eksekutif atau bisnis, berarti tidak ada penghematan uang rakyat. Justru anggota dewan yang bersangkutan untung karena mendapatkan selisih dan hal itu merupakan penghasilan tambahan, apakah hal ini dilaporkan dalam pengisian SPT

Pajak? Jika tidak, bukankah ini merupakan contoh buruk kepada masyarakat?”(Santosa,2015,h.115.

Sejak kejadian kunjungan kerja ke Palu itu, Basuki mengayuhkan langkah-langkah kecil dengan melaporkan setiap aktivitas kerjanya sebagai anggota DPR, mulai dari rapat kerja sampai kunjungan kerja. Bahkan Basuki membuat laporan keuangan, lengkap dengan rincian biaya yang digunakan selama kunjungan kerja ke berbagai daerah. Dan Basuki setuju agar setiap anggota DPR, termasuk pejabat eselon satu dan dua, diwajibkan menggunakan kelas ekonomi dalam melakukan perjalanan dinas (Santosa, 2015,h.116)

Dari *scene* diatas motif komunikasi Basuki atas argumen yang dilontarkannya adalah menunjukkan dirinya tengah berjuang menularkan “budaya bersih” kepada sesama anggota dewan untuk mengembangkan budaya antikorupsi, transparan, dan profesional dengan menuntut pembuktian terbalik. Hal ini dibuktikannya dengan mengayuhkan langkah-langkah kecil dengan menjadi pionir dengan melaporkan setiap aktivitas kerjanya sebagai anggota DPR, mulai dari rapat kerja sama sampai kunjungan kerja. Ia juga membuat laporan keuangan, lengkap dengan rincian biaya yang digunakan selama kunjungan kerja ke berbagai daerah (Santoso,2015,h.116).

4.4. Komunikasi politik Basuki Tjahaja Purnama Saat Menjadi Gubernur DKI Jakarta

4.4.1. Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama terhadap Partai Gerindra dan DPRD DKI Jakarta

Basuki Tjahaja Purnama terlihat semakin proaktif melawan rasuah. Ahok ingin Metropolitan terbebas korupsi, *Jakarta Zero Corruption*. Ia ingin bersih-

bersih birokrasi dari rasuah, calo dan premanisme. Namun, tantangan itu tidak mudah, ada lebih banyak jalan terjal daripada jalan terbentang. Tidak sedikit terbentur jalan buntu ketimbang terobosan yang memberikan jalan keluar. Menata Jakarta memang tidak gampang, selalu saja ada pihak-pihak yang mempersulit, yang biasanya mereka yang akan kehilangan sumber uang ilegal (Randan,2014,h.70).

Pada Oktober 2014, kemenangan Jokowi-JK menjadi presiden terpilih periode 2014-2019, kompas politik nasional berubah arah Kubu Prabowo-Hatta gagal berkuasa. Sengketa Pilpres ternyata tidak kunjung selesai berdampak kepada gugatan kubu Prabowo-Hatta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun gayung tidak bersambut, PTUN menyatakan tidak punya wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Pilpres yang diajukan Prabowo-Hatta.

Gagal “menduduki” Istana Negara, Koalisi Merah Putih (Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS, ditambah Partai Demokrat) mengalihkan kekuatan, ingin mendukung pilkada lewat DPRD (Seri Majalah Tempo, 2014,h.132). KMP ingin ‘mematikan’ Pilkada langsung, dan membangkitkan Pilkada tidak langsung zaman rezim Orde Baru. Gubernur, bupati, dan walikota tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tetapi melalui perwakilan DPRD. Tak ada lagi *Vox Populi, Vo Dei*, Suara Rakyat, Suara Tuhan. Hak memilih rakyat segera dirampas. Kedaulatan rakyat ditelikung. Indonesia kembali menganut “demokrasi perwakilan.” Gaya orde baru. (Santosa,2015,h.263)

Wacana pilkada tidak langsung lantas memancing reaksi keras dari salah satu kader Gerindra, yakni Plt. DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ia memiliki pandangan politik yang bersebrangan dengan partai pengusung, dengan vokal ia menentang partai politik dan pihak yang mendukung terhadap rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Bukan ngetweet sekelas Fahri Hamzah maupun menyeruakan pendapat melalui tulisan yang bisa dimasukkan ke dalam kolom surat media. Ahok yang memiliki ciri khas terletak pada kritik pedasnya tanpa tebang pilih. Keterbukaannya kepada media, membuatnya menjadi seorang *newsmakers*, yang setiap tindakannya terlepas dari pemberitaan positif maupun negatif tidak terlepas dari sorotan media. Kegusaran tersebut diungkapkannya melalui *doorstep* dengan wartawan sama sekali tidak ada nada dilematis saat ia melakukan di Balaikota Jakarta ia mulai menalarkan argumentasinya:

“Dulu kenapa ada reformasi? Karena ada pemilihan kepala daerah langsung dipilih rakyat. Kalau sampai rencana itu terealisasi, kepala daerah tidak akan mengurus rakyatnya.”

“Eksekutif nantinya hanya akan menjadi ‘sapi perah’ anggota dewan, dan kongkalikong politik semakin dahsyat. Gubernur, bupati, atau walikota tidak akan pernah lagi mengurus kepentingan rakyat. Para kepala daerah itu nanti hanya mengurus kepentingan DPRD yang telah memilih mereka. Setiap tahun akan ada pertanggungjawaban kinerja kepala daerah kepada DPRD. Jika anggota dewan menolak, kepala daerah langsung diberhentikan. Itulah yang terjadi di zaman Orde Baru, DPRD berkuasa.”(Santosa,2015,h.266)

Selain *money politic*, efisiensi biaya adalah alasan kuat untuk menggelar Pilkada oleh DPRD yang tentu saja tidak semahal pilkada langsung. Tetapi, Ahok menampik hal tersebut dalam argumennya tegas dan lugas yang menggunakan bahasa tidak baku. Bahasanya memposisikan dirinya sejajar, seperti seorang teman yang sedang menggurui atau menasehati, “Sekarang reformasi sudah

terjadi. Alasannya biaya mahal, ya karena mesti nyogok rakyat; *lo* aja bego mau nyogok rakyat. Jokowi-Ahok kagak nyogok, bisa kepilih menjadi gubernur dan wagub di Jakarta.”(MetroTv: Ahok jadi Polemik, 2014)

Melalui argumennya tersebut, tersirat nada kekecewaannya kepada partai pendukungnya. Ahok merupakan seseorang yang lahir dan namanya dibesarkan dari pemilihan kepala daerah yang langsung dipilih rakyat. Demokrasi Hakikatnya adalah partisipasi, semakin luas demokrasi semakin sehat demokrasi, dia tahu masyarakat sudah jadi bagian yang menggairahkan dari demokrasi. Ia mengklaim memang jika pemilihan langsung akan banyak memakan biaya, namun Ahok membuat penekanan pada pengucapan “sapi perah” anggota dewan yang bermakna konotasi negatif yaitu bermakna mencari untung dari orang lain yang tidak halal.

“Mereka yang mengusulkan itu adalah orang-orang yang bukan berjiwa rakyat. Tolong yang mengusulkan itu jangan munafik. Jangan hanya alasan biaya mahal. Memang lebih murah nyogok anggota dewan; itu mah bukan negarawan, dan pikirannya pengecut.” Kata ahok geram (MetroTv: Ahok jadi Polemik, 2014)

Tanpa basa-basi Ahok kembali melontarkan kritik kerasnya, ia menuding Kementerian Dalam Negeri juga turut andil sebagai pihak pengusul RUU Pilkada bersama partai-partai dalam Koalisi Merah Putih tidak pro-rakyat atau tidak negarawan. Melalui argumennya ia mempertanyakan sosok negarawan di Negeri secara tersirat ia menyebut sosok itu “*munafik*”. Sosok negarawan haruslah mendengar suara rakyat bukan malah mempersempit partisipasi rakyat. Menurutnya sulit bagi calon kepala daerah dari kalangan minoritas dan terbukti bersih untuk bisa bersaing merebut kursi pemerintahan. Jika dirinya dipilih

melalui DPRD tentu ia tidak akan bisa menduduki kursi kepala daerah DKI Jakarta seperti sekarang ini. kembali mengingatkan, bahwa Pilkada oleh DPRD merupakan kemunduran dan melupakan sejarah pemilihan yang dilakukan oleh rakyat:

Melalui *scene* diatas Ahok yang merupakan kader Gerindra tidak sungkan mengkritik tajam partainya jika Pemilihan Kepala Daerah dilangsungkan lewat DPRD. Ia menganggap tindakan partainya yang tergabung dalam KMP tersebut bukan jaminan mengakhiri *money politics*, tapi justru memindahkan *money politics* dari ranah publik ke ruang tertutup (politik transaksional) yang tidak bisa diawasi rakyat. Dan hal ini tentu mengembalikan demokrasi Indonesia ke Orde Baru dan menghilangkan fungsi *check and balance*. Dimana DPRD nantinya hanya akan memilih calon yang sejalan dengan kepentingan golongannya.

Pernyataan Ahok saat *doorstep* di Balai Kota itu sepotan langsung ditantang oleh ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. M.Taufik, “Jangan cuma cerita. Saya kira segera saja bikin pengunduran diri. Silahkan, itu hak orang, mau maju, mau mundur, silahkan. Partai tidak akan melarang, “Kalau mau konsisten, setelah mundur dari partai, mundur juga dari jabatan gubernur. Kan, dia bisa jadi, seperti sekarang karena partai. Jadi, jangan mau enaknya aja.” (Tempo, September 2014). Ahok jadi bulan-bulanan kader Gerindra bahkan ia dinilai sebagai Malin Kundang, Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa, kecewa kalau Ahok mundur sebagai kader yang telah membesarkannya, “Kita ini ibu yang baik membesarkan anaknya. Biar rakyat yang menilai, anak lupa sama ibunya, ya sudah seperti Malin Kundang” (Santosa, 2015, h.269).

Rabu 10 November 2014, Ahok resmi mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Ahok meminta dua orang staffnya untuk mengantarkan surat itu ke Kantor DPP Partai Gerindra di Ragunan, Jakarta Selatan. Hari itu juga Ahok mendapat tanda terima atas surat pengunduran dirinya dari DPP Gerindra. Di secarik kertas tertulis: *Sudah terima dari Ir.Basuki Tjahaja Purnama, M.M kepada Sekjen DPP Partai Gerindra. Berupa surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Gerindra dan Kartu Keanggotaan Gerindra* (Santosa,2015,h.271). Ahok mengatakan latar belakang pengunduran dirinya karena adanya perbedaan cara pandangya dengan kebijakan partai terutama dalam wacana RUU Pilkada, Hal tersebut diungkapkannya saat *doorstop* menanggapi jurnalis di di Balai Kota, sebagai mana dikatakannya:

“Saya hanya mengatakan saya mengundurkan diri dari Gerindra, karena saya tidak bisa menjadi anggota partai yang baik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) anda harus mendukung, dan mensukseskan semua program partai politik. Sedangkan saya itu berlawanan dengan nurani saya, kalau partai politik saya mengatakan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Sedangkan saya bisa berani masuk politik karena saya ada kesempatan dipilih rakyat.” (Metro TV,2014)

Saya ga mau jadi budak DPRD. Bagi saya DPRD itu hanya pengawas, pengawasan, anggaran dan legislasi, tidak bisa mengontrol saya. Mengontrol saya rakyat, kalau Cuma dikontrol 100 orang lebih, kita bayar 60 orang digaji aja pulang, tiap hari dibawa jalan-jalan keluar negeri aja, kita *service* aja dia habis ngapain ngurus 10 juta orang.” (Metro TV, 2014)

Melalui pernyataannya terselip nada kecewanya saat diwawancara oleh media. Ahok yang biasanya memiliki ciri khas nada berapi-api, menggunakan bahasa yang baku dan santai walaupun bukan berada di situasi formal. Ia sedikit menurunkan volume dan kecepatan suaranya dengan wajah datar, menunjukkan

kerendahan dirinya bahwa ia tidak mampu menjadi kader partai yang baik hal itu ditekankan saat menyatakan kalimat *“Saya hanya mengatakan saya mengundurkan diri dari Gerindra, karena saya tidak bisa menjadi anggota partai yang baik.”* Namun ia tetap melontarkan kata sarkasme bernada negatif “budak” yang ditujukan kepada DPRD. Dengan maksud ia tidak ingin di setir oleh kepentingan oknum-oknum yang berada DPRD karena hal itu bertentangan dengan hati nuraninya. Ahok meyakini bahwa legislatif selaku wakil rakyat hanya bertugas sebagai pengawas kinerja eksekutif. Jika kinerja eksekutif telah melenceng dari berbagai program yang ada, DPRD wajib menegur dan mengoreksi kepala daerah. Bukan pengendali kepala daerah dalam merealisasikan berbagai kebijakan publik. Kekonsistenan sikap politiknya tersebut sudah dimulai semenjak ia terjun menjadi kepala daerah di Belitung Timur hal tersebut diklarifikasi Ahok saat diundang di talkshow Metro TV, di Episode Ahok jadi Polemik:

“Saya bisa karena saya tidak curi uang, karena saya tidak mempertanggungjawabkan setiap tahun kepada DPRD. DPRD mayoritas saya lawan! orang saya dipilih rakyat kok, anda tidak bisa mecat saya. Selama saya jujur, kenapa saya bisa melawan DPRD yang Mayoritas. karena setiap anggota DPRD kan punya hati nurani, kalau hati nurani kan tidak membedakan suku agama, ras, dan etnis. Kalau hati nuraninya sama pasti akan membicarakan kemanusiaan.”

“Kenapa saya mau membayar harga mahal, karena Jakarta inilah tontonan yang paling baik untuk membuktikan bahwa Pilkada langsung anda mendapatkan kesempatan mendapatkan yang terbaik, bukan permainan paham-kepaham dari DPRD, (Metro Tv; Ahok jadi Polemik,2014)

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengaku kecewa dan menilai Ahok sebagai politikus oportunis yang tidak mengerti etika yang

menganggap partai sebagai '*kutu loncat*'. Fadli Zon menganggap Ahok tak sepatasnya ikut mengomentari mengenai RUU Pilkada, apalagi sampai berujung pada rencana mengundurkan diri sebagai kader Gerindra. Ahok sebagai Ketua DPP Bidang Politik Partai Gerindra seharusnya mengikuti keputusan partai. Fadli Zon juga mempertegas bahwa Gerindra mendukung kepala daerah dipilih DPRD karena pilkada langsung dianggap lebih banyak mudaratnya, seperti banyaknya kepala daerah terjerat korupsi karena biaya tinggi, merebut kekuasaan horizontal contohnya, konflik di Papua, kantor DPRD Dibakar (Kuntoro, 2014).

Soal pernyataan Fadli Zon, Ahok tidak sependapat ia kembali membalas argumen tersebut di media. Pemilihan kepala daerah di Papua memang diwarnai pembakaran kantor DPRD, tetapi di Jakarta berlangsung aman dan tenteram. Ahok masih mengingat detik-detik ketika meninggalkan Golkar dan ditarik Gerindra untuk dicalonkan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta karena berbagai janji pro-rakyat dan tidak bermain *money politics*. Ahok menjadi heran, kenapa Gerindra sekarang justru memiliki pandangan Pilkada melalui DPRD. Ia benar-benar tidak bisa menerima keputusan Partai Gerindra yang mendorong pemilihan kepala daerah dikembalikan seperti zaman Orde Baru. Ia menganggap Gerindra sudah tidak lagi sejalan dengan visi politiknya. Gerindra sudah melakukan *blunder*. Ia pun siap berpaling, " Saya bilang dari awal, saya ini tidak pernah loyal kepada partai yang tidak sesuai konstitusi. Bagi saya, Partai Gerindra sudah tidak sesuai dengan perjuangan saya untuk memberikan rakyat pilihan." Tegas Ahok (Santosa,2015,h.270).

Selepas Ahok dari Gerindra, tawaran dari Hanura, PKB dan PDIP pun berkumandang di media cetak dan elektronik. Presiden terpilih Joko Widodo mengapresiasi langkah Ahok keluar dari Gerindra, “Menurut saya, itu sebuah keberanian sikap beliau. Harus dihargai, Pak Ahok pasti merasakan sendiri bahwa Pilkada langsung menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan demokratis.” Selain memuji, Jokowi mengaku senang jika Ahok berlabuh di PDI Perjuangan. “Kalau benar, berarti saya dapat satu ya,” kata Jokowi (Kuwado, 2014).

Namun, Ahok menjamin dirinya tidak akan membelot ke PDI Perjuangan atau partai politik lainnya. Ia akan membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin tanpa bantuan partai politik. Ia meyakini, jauh lebih penting, seorang gubernur mendapat dukungan rakyat daripada dukungan anggota DPRD. Lalu Ahok menjanjikan masyarakat Indonesia sebuah tontonan yang menarik selama sisa tiga tahun masa jabatannya sebagai Gubernur Jakarta tanpa menjadi anggota partai meski harus menghadapi 106 anggota DPRD dari partai politik. Bersiteguh akan membereskan semua tugas Jakarta di sisa masa jabatannya, ia menyebut upaya itu sebagai bumbu menarik dari tontonan yang dia janjikan (Santosa, 2015, h. 272)

Melalui situasi *scene* di atas terdapat konstentasi makna terhadap pernyataan-pernyataan dari aktor-aktor politik. Munculnya perdebatan yang tumbuh menjadi kontroversi memperlihatkan sikap aktor-aktor politik yang mengecam sikap politik ahok untuk muncur dari partai Gerindra yang membesarkan namanya dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, perubahan sikap

Basuki Tjahaja Purnama yang awalnya kooperatif menjadi nonkooperatif (politik zig zag) menunjukkan bahwasanya ia telah kecewa terhadap partai politik. Motif Awal Ahok mendukung Partai Gerindra karena memiliki pandangan ideologi yang sama yaitu Pancasila. tidak memandang suku, agama, dan ras dalam memilih calon yang diusungnya serta pro-rakyat. Namun karena keputusan politik Gerindra ia melihat adanya perbedaan garis perjuangan dengan partai politiknya yang ingin melakukan RUU pilkada. Sikap (*attitude*) Ahok jauh dari keberpihakannya mendukung Gerindra merealisasikan Pilkada melalui perwakilan DPRD. Opsi pemilihan kepala daerah lewat DPRD merupakan kemuduran demokrasi. Terselenggaranya pemilihan langsung oleh masyarakat merupakan bagian dari pesta demokrasi yang menggairahkan dan akan memberikan kesempatan kepada pemimpin lokal daerah yang idealis dan berkualitas bersaing secara sehat dalam politik nasional tanpa harus terikat dengan kepentingan transaksional dengan DPRD. Ahok merasakan bahwa pemegang kekuasaan yang sebenarnya adalah rakyat.

Tidak sampai disitu saja Pada Tahun 2015, Ahok kembali mengkritik DPRD DKI Jakarta, tampaknya ia tidak puas atas penganggaran uang negara yang dianggapnya tidak tepat sasaran dan penuh trik jahat. Saat penyusunan APBD DKI sudah menjadi rahasia umum bahwa hubungan antara Gubernur DKI Jakarta dan anggota DPRD DKI Jakarta tidak berjalan mulus. Kedua pihak kerap berselisih dan saling kritik melalui media. Sengketa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD dan Ahok berawal dari rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 yang diajukan DPRD mempertegas

kembali bahwa praktek gelap memainkan anggaran masi terus terjadi (Majalah Gatra,2015). Kritik-kritik pedas pun mengandung muatan sindiran yang dilakukan di media, melalui salah satu acara TV swasta, Ahok diwawancarai oleh presenter Kompas Aiman Witjaksono (2015) dengan ciri khas bahasanya yang informal dan dominan meninggi dalam mempertahankan argumennya:

“Orang santun itu ga ada guna kalau kamu fitnah, kita sadar betul ini resiko kehilangan nyawa melawan koruptor yang santun-santun di negeri ini”

“ Kalo kami tidak buat salah saja difitnah, kalau betul ada suap 12,7 Triliun, kenapa si DPRD membatalkan laporan ke Bareskrim, berarti lu pengecut, kalo lu memang ada bukti ya laporin dong! Jantan dong jadi orang, lapor dong! Kita udah ada anggaran 12,7 T untuk beli tanah, alat berat, dan truk sampah sedangkan lu (DPRD DKI) anggarin 12,1 T untuk beli UPS, ya ga bisa dong! Barang lu ga ada guna nih. Suara meninggi.”

“Ini kan sudah puluhan tahun dilakukan, tapi cuma sekarang bermasalah, berarti yang tidak beres Gubernur si Ahok ini, bukan tidak bisa berkomunikasi, tapi tidak bisa berkonspirasi”

“Dia Cuma modal otaknya aja masukin anggaran belanjanya selesai, justru saya sekarang berhasil saya mau bikin DPRD ngamuk nih supaya dia ga kebagian rezeki lalu dia marah besar semua pengeluaran uang di DKI di Plototin habis, di kritik abis, sip *lo* jadi auditor *gw* sekarang, sesuai *lo* di gaji, sekarang bagus nih kerja anak buah *gw* tuh yang 72.000 pegawai yang diawasin. Kalau ini *lo* awasin *lo* jadi auditor gratis saya, *lo* awasin deh kasih tau siap yang maling, siapa yang nyolong kasih tau saya biar langsung saya pecat!!

Jika diamati argumen di atas secara mayoritas menunjukkan kegeraman Basuki Tjahaja Purnama terhadap langkah DPRD. Penyematan kata “*lo pengecut*”, “*jantan dong*”, “*cuma modal otak*.” Penggunaan kata-kata ini biasanya digunakan jika ingin menyudutkan lawan Tujuannya sebagai penegasan untuk memperkuat makna. Kata ‘*jantan*’ itu sendiri sudah memiliki makna yang kuat, garang, dan ganas. Merupakan muatan sindiran pada sikap DPRD, terkesan

meremehkan dan merendahkan kualitas DPRD. Ahok juga juga mengganti kata koruptor sebagai simbolisasi dengan sebutan yang lebih receh yaitu “*maling*.” Beberapa kali Aiman Wiyjaksono, selaku Host Eksklusif Kompas mengingatkan bahwa mereka sedang melakukan acara *Live* karna kerap kali Ahok mengeluarkan kata-kata kasar maka sering terjadi sensor ditengah ungkapan yang dilontarkan Ahok.

Sikap melawan arus Ahok yang berujung pada penolakannya terhadap program usulan tersebut membuat DPRD gusar. Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana dari Partai Pembangunan juga merupakan salah satu penggagas hak menyelidiki Gubernur Jakarta tersebut menampik sebutan ‘anggaran titipan’ atau ‘program siluman’. Menurutnya bahwa anggota DPRD mempunyai hak untuk mengusulkan dana secara terbuka dan melibatkan swadaya masyarakat:

“Kami dan SKPD duduk bersama membahasnya. Tapi usul Dewan ditolak Basuki. Dia menganggap usul itu siluman. Nih, ya, es kemong pake roti. Ahok kalo ngomong ati-ati.”(Seri Majalah Tempo,h.38,2015)

Untuk mengecek klaim Lulung, Ahok segera mengevaluasi anggaran 2014 yang pengajuannya dan pengesahannya belum melalui *e-budgetting*. Ia fokus pada usul pengadaan *Uninterruptible power suplay* (UPS) yang menjadi bagian dari usul program visi misi DPRD di kecamatan dan kelurahan se-Jakarta Barat. Program yang diusulkan Komisi A itu misalnya, bernilai Rp 4,2 miliar di kecamatan Cengkareng, namun Camat Cengkareng, Ali Maulana menampik bahwa mereka mengusulkan pengadaan UPS (Seri Majalah Tempo,2015,h.33). Melalui temuan

itu Ahok yakin anggaran itu bisa muncul berkat permainan DPRD bekerja sama dengan birokrasi.

“Ironis sekali. Masak iya, saat 46% sekolah mau ambruk, pengadaannya justru untuk UPS, bilingual system, meja-kursi dan papan elektronik. Dan ini terjadi bertahun-tahun.” (Seri Majalah Tempo,2015,h.38).

DPRD semakin meradang melihat jawaban Ahok. Mereka menggagalkan pengajuan hak angket, yang disetujui semua fraksi. Termasuk Partai PDIP yang mengusung Jokowi-Ahok pada 2012. Menurut Ferrial Sofyan mantan ketua DPRD Jakarta periode 2009-2014 tradisi menitipkan anggaran di luar kesepakatan rapat tak pernah bermasalah karena selalu diloloskan pemerintah. Nilainya puluhan triliun rupiah, yang bisa dicairkan begitu anggaran disetujui Kementerian Dalam Negeri

“Menurut pak Ferrial, Ini kan sudah puluhan tahun dilakukan, tapi cuma sekarang bermasalah, berarti yang tidak beres Gubernur si Ahok ini, bukan tidak bisa berkomunikasi, tapi tidak bisa berkonspirasi” (Seri Majalah tempo,2015,h.32)

Solusi yang ditawarkan Basuki untuk transparansi APBD adalah menggunakan sistem *e-budgetting*, bagian dari upaya transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar sistemnya bisa dipantau sehingga tidak bisa melakukan penyelewengan anggaran. Belajar dari pengalaman tahun 2012 Pemprov DKI sudah menggarakan untuk membeli truk sampah namun setelah sampai kepada Kemendagri anggaran tersebut tidak ada.

Adanya ketegangan politik yang intens diantara dua kubu yaitu Basuki dan DPRD, saat DPRD dikabarkan akan mengajukan Hak Angket kepada Basuki.

Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD dari Partai Pembangunan juga merupakan salah satu penggagas hak menyelidiki Gubernur Jakarta tersebut. Menurutnya bahwa anggota DPRD mempunyai hak untuk mengusulkan dana secara terbuka dan melibatkan swadaya masyarakat. Ketua panitia hak angket DPRD DKI Muhammad Sangaji sebelumnya menyatakan Gubernur Basuki melakukan pelanggaran etika dan undang-undang terkait penyerahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) yang bukan hasil pembahasan dengan legislatif (Cahya,2015).

Melalui tindakan (*act*) tersebut merupakan penggambaran sikap politik non-kooperatif Ahok kepada anggota DPRD DKI Jakarta. Ahok di kritik tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan DPRD. Namun ia kembali melakukan pembelaan diri dengan menanggapi hal tersebut saat *doorstep* di Balai Kota Jakarta:

“Ini sudah tidak ada lagi namanya kompromi, apa yang mau diperdamaikan, saya sampai mati juga tidak mau memasukkan 12,1 ke dalam APBD !! Terus kalo DPRD tetap ngotot tidak mau memasukkan e-budgetting yang dimasukkan SKPD bagaimana mau ketemu??”

“Orang bilang gaya komunikasi saya, mau komunikasi gimana? Ingat ga dulu sampai paripurna juga kemarin senyum..senyum..cipika-cipiki semua sama saya baik-baik kok. Siapa yang bilang gaya komunikasi saya jelek sama DPRD? Coba kalau saya terima anggaran DPRD 12,1 T baik ga mereka sama saya? Baik.. Jadi ini bukan soal komunikasi, ini soal 12,T Boss!! (MetroTV, 2015)

Ahok dalam argumennya bertutur dengan nada suara tinggi pada penggalan kata “cipika-cipiki” dan “senyam-senyum”. Terdapat penekanan digunakan Ahok untuk menunjukkan maksudnya pada penggalan “Coba kalau

saya terima anggaran DPRD 12,1 triliun baik ga mereka sama saya? Baik.” Penggalan tersebut menunjukkan maksud bahwa dirinya bukan tidak bisa berkomunikasi santun, namun kepeduliannya terhadap pemimpin yang jujur. Ahok menunjukkan pribadi yang teguh pendirian, tidak berbelit-belit, anti ketidakadilan.

Tidak selesai sampai disitu, Basuki Tjahaja Purnama nampak menampilkan sikap dirinya sebagai oposisi dan pengkritik DPRD kerap kali memberikan sindiran-sindiran yang lugas dan langsung. Tanpa dibalut kalimat yang berputar-putar. Masih terkait anggaran siluman, melalui bahasa-bahasa sarkasnya Ahok menyindir oknum DPRD DKI secara objektif yang mengusulkan *pembelian uninterruptible power supply* (UPS) kerap menjadi topiknya dalam komunikasi kepada lawan politiknya menimbulkan kesan agresif namun mengandung humor. Kata-kata satiris pun keluar, Hal tersebut diungkapkannya melalui media nasional, Metro TV acara Stand Up Comedy:

“Orang bilang saya tukang ribut, tukang berantem enggak sebetulnya. Hanya terjadi selisih paham. Kira-kira kalo beli laptop mesti make UPS, kira-kira marah ga kalian? Laptop pake UPS? Lucu kan! Oh saya ngerti sekarang. UPS mahal? Murah dong! Kalo yang ini apa ini? Kata Ahok sembari mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya

“USB!” Jawan hadirin

“USB juga murah kan? Murah! Tapi kenapa jadi 6 miliar ini. Karena gini masalahnya, laptop ada baterai kaga cukup. Beli laptop pasti minta beli USB juga kan. Nah kenapa mahal? Karena USB yang dibeli kemarin itu bisa berfungsi menjadi UPS. Nah makanya didunia kaga ada itu! “ Lanjut ahok

Ya itulah kita jadi pejabat harus banyak belajar memang, banyak hal kita mesti pelajari, karena memang nasibnya begitu. Orang salah paham melulu. Dari tadi gw ngakak-ngakak dibilang marah-marah.

Kalo kamu memang mau jadi pejabat itu, syaratnya ga susah. Anda cuma butuh makan pil. Ada obatnya itu kalo mau jadi pejabat. Pilnya itu agak gede, dia tulisannya PPG, artinya ada dua juga pertama

pinter-pinter goblok dan pura-pura gila. Nah tergantung nih, kalo pejabat minumnya yang pura-pura gila ya itu kaya model Saya. Tapi kalo tablet kedua yang diminum yang pintar-pintar goblok. Itu kaya oknum DPRD itu, UPS dibeli begitu mahal!”
(Stand Up Comedy, 3 Mei 2015)

Dari gaya ceplas-ceplos yang disampaikannya melalui acara *standup comedy* tersebut mengenai terkait kasus UPS yang dikaitkannya dengan DPRD membuat penonton terkekeh. Ahok memperlihatkan citra diri, dibalik sikap tegasnya, bahkan ekspresi marahnya yang kerap kali menjadi konsumsi publik tertangkap layar kaca, sejatinya Ahok memiliki kepribadian yang sangat humoris. Kata informal ‘lu’, ‘gw’ cenderung dituturkan Ahok sebagai upaya menyamakan bahasa dengan masyarakat agar mudah dipahami dan menimbulkan kedekatan.

Motif utama dari argumen Ahok pada adegan (*scene*) diatas adalah upaya mewujudkan Bersih, Transparan, dan Profesional dalam roda pemerintahan Indonesia khususnya melalui pengelolaan anggaran daerah yang dilakukan menggunakan sistem *e-budgeting*. Karakter yang tegas ini ia tunjukkan dalam berbagai tindakan (*act*) selain memberikan kritik, ditengah argumennya Ahok juga memberikan solusi dalam penyusunan RAPBD 2015. Disini Basuki Tjahaja Purnama ingin menunjukkan solusi bahwasanya dengan menggunakan sistem *e-budgeting* sebagai langkah preventif Pemprov DKI dalam mengantisipasi penyalahgunaan anggaran, lebih efisien dan dana yang dialokasikan akan tepat sasaran, sesuai yang dibutuhkan masyarakat di lapangan. Dari sisi distribusi, anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Seri Majalah Tempo, h.30, 2015). Hal ini dijamin Ahok tidak rawan kebocoran, karena pelaksanaannya diawasi ketat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI dan

pemegang otoritas tertentu saja yang memiliki *password* dan kewenangan mengubah anggaran. Untuk itu kerap kali argumen yang dilontarkan, basuki secara gamblang mengatakan perlunya dukungan legislatif untuk mencapai harmonisasi pemprov DKI dalam mewujudkan transparansi.

4.4.2. Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama terhadap BPK DKI Jakarta

Basuki Tjahaja Purnama selama menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta melanjutkan sisa jabatan 2014-2017. Basuki Tjahaja sebagai orang nomor 1 DKI tersebut tentunya aktif melakukan komunikasi politik dengan pemerintah sebagai mitra kerjanya. Komunikasi politik yang disampaikan Ahok mengandung pesan-pesan politik yang menjadi ciri khasnya dalam menyampaikan tujuannya. Dalam hal ini, Ahok menyampaikan pesan politiknya melalui sorotan stasiun televisi nasional atau melalui akun YouTube Pemprov DKI Jakarta. Walaupun dia juga seorang esekutif pemerintahan, Ahok tidak segan melontarkan kritik tajamnya dalam mengkritisi kinerja pemerintah. Basuki Tjahaja Purnama adalah sebuah anomali politik di Tanah Nusantara, ia memilih menjadi berbeda meski harus dicap sebagai si keras kepala. Ia tau untuk menjadi sama tak perlu harus serupa karena berbeda untuk maju itu adalah hal yang langka di negeri ini. Gaya komunikasinya begitu khas, mendobrak sekat-sekat ketabuan formal.

Pada tahun 2015, berdasarkan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) DKI Jakarta pada rumah sakit sumber waras yang di beli Pemprov DKI Jakarta Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menimbulkan polemik, dari pembelian lahan tersebut menurut catatan BPK DKI Jakarta adanya dugaan kerugian negara

sebesar 191 miliar rupiah dalam pembelian tersebut. Adanya perbedaan acuan dalam pembelian lahan rumah sakit sumber waras mengundang kontroversi. Ahok mulai mengkritik kinerja Badan audit tersebut serta Ahok menantang BPK untuk menempuh jalur hukum agar lebih transparansi dan dapat disaksikan masyarakat. Hal tersebut diungkapkannya melalui wawancara dengan wartawan Metrotv News. Ia tampak mengungkapkan kemarahannya dengan bahasa lugas. Menurutnya banyak oknum-oknum yang berlindung dibawah institusi termasuk dibawah naungan BPK DKI Jakarta:

“Nah secara logika begini, dia yang nuduh kita itu dibilang goblok, nanti tersinggung. Saya mengerti pikiran mereka, mungkin oknum BPK berpikir “kamu mana berani sih lawan BPK, saya mah ga peduli! Kalau Tuhan ngaco aja gue lawan, masalahnya Tuhan ga mungkin ngaco! Kalau ngaco pasti bukan Tuhan. (Mata Najwa: Pertaruhan Ahok, 16 Maret 2016)

“8 bulan tidak manggil saya, dan mengatakan tidak mengikuti prosedur Undang-Undang, ini apa Boss!! Ini apa Boss!! BPK, *lo* kira *gue* takut. Makanya saya berpikir BPK ini isinya lebih banyak oknum. Kamu kira atas institusi BPK saya takut sama kalian, makanya saya bilang buka semua di pengadilan!!” ujar Ahok dengan nada tinggi sembari menunjuk dokumen yang ia kirimkan ke majelis kehormatan BPK (MetroTv, 13 April 2016)

“Sekarang saya tanya, BPK berani tidak buktikan hartanya dari mana, jadi jangan asal ngomong di Republik ini. Saya bilang kepada salah satu PT yang audit saya, “kamu ada di BPK ya, salam tuh sama, Prof. Edi, bilangin “Ahok doain dia umur panjang” untuk liat Ahok jadi presiden.” Supaya saya berantas munafik-munafik.”

“Uda sore nih ya dia nanya pertanyaan yang lucu banget, pertanyaan dia sederhana, “Bapak pernah ga berpikir, kenapa bapak tidak perlambat NJOP?” Saya jawab” saya ga pernah berpikir rencana itu, karena itu kejahatan, tugas saya adalah mengadministrasi keadilan sosial.” (Pemprov DKI, 14 April 2016)

Ahok dalam argumennya yang di atas, dengan gaya ceplas, penggunaan kata “Boss” dan juga diikuti penekanan nada saat mengucapkannya. Merupakan

sindiran langsung kepada seorang pimpinan BPK, Edy Mulyadi. Disini Ahok menunjukkan bahwa hubungan komunikasi dan komunikator sejajar. Sama halnya dengan kalimat *“kamu ada di BPK ya, salam tuh sama, Prof. Edy, bilangin “Ahok doain dia umur panjang untuk liat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik-munafik.”, dan “Tuhan ngaco aja gue lawan,”* Dibalik argumen tersebut Ahok ingin menunjukkan ambisinya atas kepercayaan diri yang tinggi bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi Presiden untuk mengadministrasi keadilan sosial, memberantas oknum-oknum di pemerintahan yang tidak bisa membuktikan kesalahan orang lain seperti jargon-jargon yang selama ini diungkapkannya saat membahas topik korupsi.

Gaya komunikasi pembuktian terbalik juga menjadi argumen andalan Ahok, untuk mempertanyakan profesional dan integritas dari badan audit tersebut. Seperti kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Effendi Ghazali menilai teguran terbuka dengan kesan meneguhkan pentingnya integritas, kejujuran sekaligus menyudutkan lawan bicaranya jika Ahok ingin menekankan sesuatu (Firdaus,2015). Hal tersebut terlihat dalam kalimat *“Sekarang saya tanya, BPK berani tidak buktikan hartanya dari mana, jadi jangan asal ngomong di Republik ini.”*

Ahok tipikal orang yang tidak bisa bersilat lidah, di akhir Tahun 2015 Ahok menuding BPK secara terang-terangan menyembunyikan data kebenaran mengaudit laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta agar dirinya dikenai pansus oleh DPRD dan diturunkan dari jabatan Gubernur. Hal ini ditunjukkannya dalam penyampaian pesan-pesan politik yang berisi tantangan kepada badan audit

pemerintahan DKI tersebut. Bahasa yang digunakan juga informal dalam situasi formal:

“Jadi, mereka ya, kalau saya lihat itu tendensiusnya memang pengin saya tidak jadi gubernur. Kalau saya menuduhnya begitu,” kata Basuki di Balai Kota

"Kalau saya menolak diperiksa, BPK akan menafsirkan saya tidak kooperatif dan dia bisa pidanakan saya *lho*. Kalau dipidana, DPRD akan memecat saya dari gubernur, Tanya jawab itu dibuka saja, biar seluruh rakyat Indonesia melihat, pertanyaan-pertanyaan itu tendensius atau tidak. Tapi dia tidak mau kasih. Sekarang saya tanya, dokter boleh tidak membuka record pasien? Tidak boleh! Tapi kalau pasiennya mau dibuka boleh tidak? Boleh! Jawab wartawan

“Saya yakin orang Indonesia, pengen nonton 8 jam..9 jam pengen tau, ini di dalam diapain gitu loh, berani ga BPK keluarin? Ga berani. Terus lebih lucu lagi tersangka aja klo mau masuk penjara, kalo ga mampu dikasih pengacara. Ini staff saya mau masuk ngebantu ga boleh, saya mana tau berkas sebegitu banyak! Segepok berkas yang dibawa staff saya, untuk bantu cari ga boleh!

“Saya sangat bersyukur, anda begini kepada saya, ini membuktikan kepada seluruh rakyat ada stigma bahwa pejabat korup, tidak jujur, ada celah. Saya akan buktikan sama kalian, bahwa saya pejabat yang tidak ada celah. Saking kesalnya saya bilang “mungkin uda takdir dikasih Tuhan untuk melawan institusi..institusi, yang diisi oknum-oknum yang tidak betul. Saya sangat senang record saya tambah lawan BPK.” Hasil audit akan dikirim ke KPK nih, kalo KPK menkhususkan saya dengan alasan tidak jelas. Berarti takdir saya juga nanti lawan oknum BPK. Wah top banget udah, lengkaplah Republik ini saya lawan semua! Ujar Ahok sambil terkekeh (Pemprov DKI Jakarta, 24 November, 2015)

Dalam argumen tersebut, Ahok secara terbuka memberikan tantangan kepada Kepala BPK. Ahok dalam memberikan kritik yang disampaikan BPK, sangat lugas dan tegas. Namun melalui teguran terbuka ini lebih lanjut bisa menjatuhkan harga diri dan citra diri dari lembaga BPK DKI Jakarta yang selama ini diyakini masyarakat sebagai lembaga yang profesional dan independen dalam melakukan audit. Terdapat penekanan pada kalimat “*kalau memang BPK ingin membuktikan tidak ada sesuatu. Tanya jawab itu dibuka saja, biar seluruh rakyat*

Indonesia melihat.” Digunakan untuk menekankan, agar BPK memperbaiki kinerja, kecermatan dan objektif dalam evaluasi proses audit anggaran tanpa mudah ditunggangi oleh kepentingan politis tertentu dan penempatan orang-orang di BPK haruslah orang-orang profesional, bukan orang yang punya kedekatan dengan parpol. Dan terlihat sikap Ahok menginginkan KPK lebih cermat menginvestigasi lebih transparan dan independen tanpa ditunggangi oleh muatan politis.

Terkait hasil kesimpulan penyidikan pembelian Rumah Sakit Sumber Waras Agus Raharjo, Ketua KPK menyatakan selama proses penyidikan yang dilakukan KPK yang mulai dilakukan 28 september 2014. Penyidik sudah menyimpulkan bahwa sejauh ini KPK tidak menemukan perbuatan melawan hukum terkait dengan pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Dan Agus Raharjo mengatakan bahwa kesimpulan tersebut bukanlah intervensi dari pimpinan KPK, melainkan laporan dari Tim penyelidik yang sudah bertugas selama beberapa bulan ini. (Beritasatu, 14 Juni 2016).

Namun pernyataan dari Ketua KPK tersebut belum memuaskan sejumlah pihak. Kasus RS Sumber Waras ternyata menjadi pematik elemen-elemen masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Puluhan orang yang menamakan dirinya Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta (AGSJ) mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka datang untuk memberikan dukungan atas penuntasan kasus dugaan korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Ratna Sarumpaet sebagai salah satu koordinator aksi AGSJ juga mengatakan bahwa pernyataan Ketua KPK, Agus Raharjo tidak berdasar.

Belum lagi audit investigasi yang dilakukan BPK tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Padahal menurutnya, BPK memberikan hasil sesuai dengan fakta yang ditemukan. Ratna juga menegaskan pihaknya akan mendukung seluruh langkah yang dilakukan BPK untuk membongkar seluruh dugaan melawan hukum yang dilakukan Pemprov DKI (Purba,2016).

Sama halnya Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung penuh BPK dalam penuntasan kasus sengketa lahan Sumber Waras, hal tersebut diutarakannya kepada awak di media bahwa :

“Hasil audit investigasi BPK, dinyatakan oleh Ketua BPK sendiri bahwa sudah terjadi kerugian negara itu, bagaimana kesalahan prosedurnya ada, tidak diverifikasi ada, tidak teliti dalam membeli ada, bisa memperkaya orang lain atau korporasi ada. Dari hal ini tidak ada kehati-hatian dalam membeli, biasanya orang yang mau membeli rumah saja kita cek dulu (Tv One, 20 April 2016).

“Saya sudah melihat langsung lokasi pembelian rumah sakit sumber waras itu, jelas bahwa lahan yang dibeli PemProv DKI itu adalah lahan terkunci (*landlock*), kalau mengikuti sertifikat kepemilikan bukan di Jln. Kai Tapang. Jadi, dimana otaknya gitu loh, saya tidak melihat rasionalitas lagi disini. Hukum mau diinjak-injak, dan ada usaha-usaha untuk melindungi orang-orang tertentu (Beritasatu, 16 Juni 2016)

Melihat hal tersebut Ahok tidak tinggal diam, kata-kata satiris pun dilontarkan untuk menanggapi orang-orang yang memberikan *counter-statement* yang ditujukan kepada Fadli Zon dan Ratna Sarumpaet. Argumennya tersebut diungkapkan saat melakukan doorstep di Balai Kota. Dengan nada santai yang menyiratkan sindiran ia mengatakan:

“Kasian Wakil Ketua DPR (Fadli Zon) kaya gitu ga ngerti tata negara, yang pilih BPK siapa? Komisi XI, yang pilih KPK siapa?Komisi III, sudah buat pansus belum oleh DPRD DKI? Sudah, lalu Hasil pansus dibawa ke KPK? Sudah. KPK sudah bikin surat belum ke BPK untuk melakukan audit investigasi? Sudah. Lalu KPK bilang belum ketemu bukti dari hasil

audit investigasi. Kata Ratna Sarumpaet saya membeli KPK, ya sudah! Kalau gitu yang dituduhkan Ratna Sarumpaet itu benar, KPK tidak ketemu berarti bohong, dia ga profesional, yang harus panggil KPK siapa? Komisi III. Yang harus panggil BPK ngauditnya ga bener siapa? DPR juga. Trus kalau panggil saya? Fadli zon emang kira saya bodoh, kalau tanya sama saya kan ga boleh buka hasil BAP dari BPK. Kalau merek panggil saya trus marah-marahin saya, nanti dibilang menghina yang terhormat, saya juga pernah jd yang terhormat Komisi II dulu”
(Pemprov DKI Jakarta, Maret 2017)

Kabar di media semakin berhembus terkait Ahok dinyatakan BPK DKI Jakarta telah melakukan kerugian negara sebanyak 191 Miliar, namun sebaliknya justru Surya Paloh, Ketua Umum Nasional Demokrat tersebut menyakini bahwa Ahok tidak terlibat dalam skandal suap kasus pembelian lahan RS Sumber Waras:

“Dukungan kita kepada Ahok jalan terus, Ahok tidak terlibat dalam hal yang merisaukan hati kita, ga ada yang lebih terbaik sampai hari ini kecuali Ahok. Jiwanya, Spiritnya, semangatnya ya itulah dukungan Nasdem sudah memenuhi ini.” (Metro TV, 10 April 2016)

Inilah jejak-jejak komunikasi yang memperlihatkan ada persaingan komunikasi yang menggambarkan kepentingan dari tiap-tiap diri yang diusahakan. Pada satu sisi lawan ahok, diartikulasikan sedemikian rupa untuk menyampaikan hal-hal yang tidak terungkap di media, berusaha menunjukkan kebenaran faktanya bahwa ahok memang telah mengakibatkan kerugian negara dan sengketa pembelian lahan RS sumber waras. Sedangkan di sisi lain, pernyataan dari Ketua Umum Partai Politik yang mendukung Ahok yaitu Nasdem tetap berpegang teguh pada hakikatnya Ahok sebagai seseorang yang bersih dan jujur tidak mungkin terlibat dalam kasus tersebut dan memiliki keyakinan bahwa polemik tersebut muncul hanya dari pihak-pihak yang ingin menjegal pemerintahan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Jika dilihat tindakan (*act*) Ahok melalui *scene* diatas, serta *agency* melalui argumen yang dilontarkan Ahok dominan kritik daripada pujian. Ahok memang tampaknya tak bisa diam ketika ia ingin mempertegas kesalahan dari sistem kerja BPK DKI Jakarta, Ahok menggunakan kritik-kritik tajam oknum-oknum yang berlindung dibawah naungan BPK tujuannya (motif) ia ingin memberitahukan kepada masyarakat selama ini BPK tidak bekerja sesuai koridor, ia juga ingin agar BPK berbenah diri kembali kepada kodrat awalnya independen tidak ada intervensi dari konflik kepentingan. Sikap (*attitude*) yang dapat ditunjukkan disini bahwa Ahok merupakan poin yang diperdebatkan. Namun ia meyakini tindakannya selama ini jujur, bersih, dan transparan sehingga tidak ada alasan baginya untuk terjat hukum untuk kasus sengketa pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

1.4.3. **Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama terhadap Komnas HAM**

Pada tahun 2016 Ahok melancarkan relokasi Kalijodo namun warga yang tidak puas dengan kebijakan penggusuran tersebut kemudian melaporkan ke Komnas HAM. Sejumlah tokoh masyarakat kemudian mendatangi Komisioner Komnas HAM Hafiz Abbas, menyesalkan ketika aparat TNI dilibatkan dalam pembongkaran bangunan di Kalijodo, dan penggusuran bangunan Kalijodo sudah mengganggu psikologis anak yang sedang menjalani persiapan ujian dan mereka juga pengerahan aparat keamanan akan memberikan *shock therapy* kepada anak dan sejumlah persoalan sosial. Terlebih lagi menurut anggota Komnas HAM Hafidz Abbas, pembongkaran yang dilakukan minim dialog hingga menimbulkan kesan arogansi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Rudi,2016).

Ahok membantah tuduhan Komnas HAM bahwa telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia saat melakukan pengusuran warga. Ahok mengaku telah memfasilitasi warga yang memiliki KTP Jakarta untuk direlokasi ketempat yang lebih layak di rumah susun. Kalijodo yang merupakan kawasan penuh bangunan liar dan juga sebagai tempat Hiburan malam. Ahok menegaskan bahwa kawasan Kalijodo lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Kasus Kalijodo dalam Undang-Undang Agraria adalah pelanggaran menguasai negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, menurutnya bukan hanya Kalijodo, namun yang menempati sungai, waduk, juga akan direlokasi sehingga dikembalikan ke fungsi semula sebagai ruang terbuka hijau milik negara (RTH). dan dalil lain relokasi warga Kalijodo demi perkembangan anak yang tinggal di kawasan prostitusi. Langkah tegasnya ini juga didukung penuh oleh TNI dan Polri. Hal tersebut dikatakan Ahok saat diwawancarai di stasiun media nasional:

“Kaya Kalijodo bilang saya melanggar HAM anak-anak, mual saya mendengarnya kamu membiarkan anak-anak itu tinggal di Kalijodo jang..jreng jeng itu musik sampai pagi di prostitusi, apa bukan melanggar HAM? Bagaimana dia mau belajar dari kecil tinggal dilingkungan seperti itu, saya pindahkannya dijemput bus sekolah apa lebih baik, ada mesjid, ga ketemu orang aneh-aneh. Masa saya dibilang melanggar HAM. Justru anak-anak susah tidur, susah belajar mendengar dangdut jraang..jrenng..jeng. Ngaco kaya begitu! Itu Cuma omongan orang yang isi otak kiri dan kanannya gimana, mesti dilihat itu otaknya penuh apa enggak, jenis apa, apa jenis udang, yang encer atau keras.” Kata Basuki santai (CNN, 14 Maret,2016)

Rencana pengusuran kawasan Kalijodo oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus menjadi perhatian publik. Terjadi perseteruan wacana antara Ahok dan tokoh Kalijodo. Mereka bersikeras tidak

mau dipindahkan ke rumah susun. Padahal, Ahok sudah menyiapkan rusun buat warga Kalijodo yang memiliki KTP DKI sementara bagi warga Kalijodo yang tidak memiliki KTP DKI akan memulangkan mereka ke kampung halamannya. Menurut warga, mereka lebih dulu tinggal di Kalijodo dibanding keputusan Pemprov DKI menetapkan kawasan tersebut sebagai jalur hijau, bahkan ada warga yang tinggal di Kalijodo secara turun temurun. Untuk itu salah satu tokoh masyarakat Kalijodo Abdul Aziz atau akrab disapa Daeng Aziz menolak dikatakan warga liar dan menuntut keadilan. Mulai Komnas HAM hingga DPRD DKI didatangi Daeng Aziz untuk mengadukan rencana penggusuran Kalijodo. Bahkan Daeng Aziz beberapa kali mengeluarkan pernyataan bernada mengkritik dan menantang Ahok:

“Jadi selama ini di televisi sudah ada sosialisasi, jangankan sosialisasi komunikasi pun tidak ada. Tapi kemarin polisi, tentara, satpol PP kurang lebih 200 orang itu hanya menempelkan selebaran. Bahwa itu sudah dianggap sudah sosialisasi, eh itu caranya menawarkan bagaimana secara manusiawi atau seperti pencuri? (TV One 16 Februari 2016)

“Dari informasi pengakuan orang yang tinggal temurun, 70 tahun tinggal disana. Saya 20 tahun tinggal disana. Status tanah memiliki bukti ditandatangani oleh pak lurah, saya bayar pajak satu objek Rp 16 juta setahun. Ini diakui oleh pemerintah bukan?. Jangab mencari-cari kesalahan masyarakat. kami tidak mau hak kami dikurangi sedikitpun. Jika ada saya akan menuntut secara hukum. Jangan saya dipaksaksakan untuk melawan. Kata Daeng Aziz lugas (Merdeka, 17 Februari 2016)

Sementara salah satu anggota DPRD yang didatangi Daeng Aziz yang dimaksud adalah Haji Lulung. Dan Lulung juga sempat mengeluarkan pernyataan yang ditujukan kepada Ahok melalui dialog Interaktif di TV One:

“Saya sangat mengapresiasi Pak Ahok melakukan penertiban prostitusi. Dan harus dipahami penertiban itu harus melakukan

pendekatan, jangan didahulukan kekuatan tentara dan militer karena kemarin saya mendengar belum ada sosialisasi namun sudah menempelkan selebaran pemberitahuan yang dikawal oleh polisi.”

“Kalau nanti tidak ada kesepakatan di tingkat kota, walikotanya jangan diberhentiin, lakukanlah komunikasi dimana saja mau di Kapolda, di Kodam, atau Kantor Gubernur, undang mereka trus pak Ahok harus ngomong, jangan sembunyi, kan rakyatnya dia.”
(Tv One, 17 Februari 2016)

Pernyataan Daeng Aziz dan Haji Lulung di media, alhasil sampai ke telinga Ahok. Dengan demikian, Ahok menegaskan tidak ada warga yang boleh tinggal di kawasan Kalijodo tersebut. Ditambah kawasan tersebut diketahui sebagai jalur hijau. Sehingga jika mereka bersikeras tinggal maka dapat dipidana. Mantan Bupati Belitung Timur tersebut itu pun membalas pernyataan Daeng Aziz dan Haji Lulung. Ahok menjawab dengan santai dengan wajah sumringah ia mengatakan:

“Kalau dia menuntut kita juga bisa menuntut dia. Makanya dia suruh baca undang-undang, dia cari Lulung sebenarnya uda cocok. Lulung kan punya kantor pengacara, di dalam sistem undang-undang pokok Agraria disebutkan bahwa namanya PBB itu bukan tanda milik. Terus kalau kamu duduk di tanah negara itu salah, bisa pidana, Apalagi kamu dudukin tanah negara disewakan ke orang dimanfaatkan untuk bisnis, itu pidana.”(Metro Tv, 16 Februari 2016)

Di Pertengahan tahun 2016 pada bulan Juli, Ahok juga melontarkan argumennya saat diwawancara oleh Najwa Shihab.

Ahok : “Sekarang saya tanya kalo saya kirim orang suruh dudukin rumah anda bagaimana? Anda usir saya dan bilang saya melanggar HAM. Hamburger mah itu namanya jadi mesti jelas HAM mana.
Najwa Shihab: *Yang membuat orang mengkritik anda bukan hanya penggusurannya, tetapi pendekatan yang diambil kalau dulu pak Jokowi melakukan pendekatan puluhan kali PKL ditemui, diajak bicara baik-baik.*

Ahok: “Mana puluhan kali, itu mah di solo, Jakarta juga dua kali uda saya gusur aja.”

Najwa Shihab: *Anda yakin sudah melakukan pendekatan yang tepat pak?*

Ahok: “Sekarang gini, kalau kamu terus ngeyel, saya dudukin rumah anda, saya ngomongin baik-baik. Trus ga mau keluar, dan minta bagi duit, kamu kira-kira ngapain saya?”

Najwa Shihab: *Pak Ahok mereka merasa itu rumah mereka loh, mereka bayar listrik, mereka bayar segala kewajiban sebagai warga negara.*

Ahok: “Makanya ini persoalan bangsa ini, puluhan tahun salah dikira benar, pas kita benarin jadi masalah, itu aja. (Mata Najwa, 18 Juni 2016)

Argumen diatas secara tersurat, menunjukkan kemarahan Ahok ketika ia menyebut kata “mual,” merasa Komnas HAM tidak mengerti pokok permasalahan dari jenis pelanggaran HAM tersebut, karena Indonesia adalah negara hukum sehingga segala bentuk pelanggaran yang tertulis di dalam Undang-Undang harus ditegakkan termasuk menguasai tanah negara untuk kepentingan pribaditerlihat pada penekanan kalimat satir “*Hamburger mah itu namanya jadi mesti jelas HAM yang mana.*” Perbedaan gaya pendekatan yang dianggap Ahok berbeda dengan walikota solo dalam merelokasi warga tersebut karena masalah di Jakarta begitu kompleks, warga-warga tidak memiliki sertifikat tanah dan membuat tempat tinggal mereka diatas tanah negara (zona hijau) yang istilah kasar disebut Ahok adalah “dudukin tanah negara,” terlebih lagi Ia menegaskan pemerintah harus melakukan tindakan untuk mengatasi kesenjangan sosial jika Kalijodo dibiarkan terus beroperasi sama saja membiarkan penyakit masyarakat menggantungkan hidup dengan sumber pencaharian yang salah. Dalam mengungkapkan argumen politiknya Ahok masih dengan ciri khasnya melakukan

penekanan melalui umpatan informal “otaknya udang, encer, atau keras”, “Ngaco” dan “ngeyel” ditujukan kepada masyarakat yang menentang relokasi kalijodo.

Pasca pengusuran, Ahok dengan nada tinggi mengecam tindakan Komnas HAM (*act*) yang membela terhadap dua pabrik dikawasan Kalijodo tanpa melihat aturan mendasar. Bahwa lokasi pembangunan pabrik tersebut berada di jalur hijau negara yang justru patut dipertanyakan sertikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut Ia tidak segan memenjarakannya (*agency*). Ia melontarkan nasihat kepada Komnas HAM agar bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang dinilainya tak pernah mengkritisi permasalahan di kawasan Angke, Jakarta Utara. Terkait kerang hijau tak layak dikonsumsi karena mengandung logam berat serta mempekerjakan anak-anak dibawah umur.

“Saya penjarain yang punya pabrik baut dan bihun. Biar dia *terkencing-kencing*, gara-gara Komnas HAM mau dibelain dia! Saya mau penjarain dia. Kalau masih nantang lagi, saya proses suratnya, penjarain yang punya pabrik baut. Saya mau tahu sampai mana Komnas Ham membantu, penjarain saja!” tegas Ahok dengan nada tinggi dengan ekspresi menegang (Tribunnews,26 Agustus 2016)

“Jadi Komnas HAM begini saja lah, tidak usah cari ribut-cari ribut sama saya lagi. Yang susah-susah orang, anak kecil kerja, lu (Komnas HAM) enggak pernah ngomong di Angke. Kerang hijau yang sudah ada racun, logam, lu ga pernah ngomomng. Kalijodo itu gue rasa yang ngomong HAM itu, dia belum lahir sudah ada Kalijodo, enggak pernah komentar.” T tutur Ahok (NewsDetik, 26 Agustus 2016)

Penggunaan diksi “*penjarakan*”, “*tangkap*” terdengar sangat frontal, kata-kata ini sering mengingatkan kita pada zaman orde baru dimana zaman kekuasaan Soeharto ketika ada yang menentang kebijakannya. Argumen berapi-api Ahok

terlihat dalam penggunaan kalimat satir dan lugas “*Biar dia terkencing-kencing, gara-gara Komnas HAM mau dibelain dia! Saya mau penjarain dia.*” Ditujukan kepada masyarakat yang “ngeyel” dalam istilah Ahok artinya sudah salah menduduki tanah negara tetapi masih ngotot bertahan. Kritik pedas yang menunjukkan kegeramannya kepada Komnas HAM terlihat pada kalimat “*Jadi Komnas HAM begini saja lah, tidak usah cari ribut-cari ribut sama saya lagi,*” pada kalimat tersebut merupakan sebuah penekanan agar Komnas HAM seharusnya berada di jalur yang sama dengan Pemprov DKI untuk mengembalikan hak-hak negara atas tanah ilegal yang dibuat warga menjadi pemukiman dan kawasan prostitusi yang sudah mengakar di lapisan masyarakat. Penekanan itu artinya sudah sering terjadi selisih paham antara Komnas HAM dan Pemprov DKI sebelumnya contoh saat menangani relokasi kampung pulo.

Melalui *scene* diatas, sikap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama selaku pemimpin kepala daerah memiliki kewenangan dalam pengendalian pemukiman dan tata ruang dengan merelokasi Kalijodo (*act*). Melalui kritik pedasnya kepada Komnas HAM, ia ingin menyampaikan agar seharusnya Komnas HAM melakukan langkah yang harmonis dan sinergis bersama Pemprov DKI dalam melakukan penegakan hukum dengan mengambil kembali hak-hak negara atas tanahnya dari warga yang selama ini menguasainya secara ilegal karena masuk ke dalam zona hijau Pemprov DKI, dimana kemudian zona tersebut dikembalikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan mengadministrasi keadilan sosial dalam mengambil langkah humanis menyelamatkan anak-anak dari lingkungan prostitusi Kalijodo.

4.4.4. Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama terhadap Media

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memang memiliki sifat yang blak-blakan dan ia mengatakan apa yang harus dikatakan. Dirinya yang tak sungkan untuk menurkan teguran terbuka baik secara live maupun saat menerima konferensi pers dari wartawan. Dikenal sering berbicara blak-blakan pernyataan yang dikeluarkan kerap menjadi kontroversi. Kata-kata keras tak hanya dilontarkannya saat mengomentari pihak yang menentang kebijakannya, tetapi juga media nasional TV One sudah langganan terkena kritik tajam Ahok.

Selama menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja kerap kali melayani pertanyaan wartawan di Balai Kota. Namun tidak selamanya pertanyaan wartawan menyenangkan hati Ahok. Ada beberapa isu sensitif yang kerap kali ditanya wartawan dan membuatnya naik pitam tersebut terutama topik mengenai kisruh APBD 2015 yang mengakibatkan konflik dengan DPRD dan juga mengenai relokasi warga yang diduga melanggar HAM.

Pada tahun 2013, Ahok naik pitam dan merasa diadu domba dengan pertanyaan wartawan yang meliputnya terkait relokasi, Ahok merasa media tersebut menggiring opini bahwa Pemprov DKI telah melanggar HAM. Ahok secara terbuka mencecar media TV One milik Aburizal Bakrie yang sedang *live* meliputnya. Ia mengungkapkan kekesalannya terhadap kualitas pertanyaan yang disampaikan wartawan media tersebut dengan bahasa khasnya. Ahok berang saat pertanyaan wartawan TV One, menyatakan banyak sekali fitnah dan pemberitaan

yang dianggap tidak logis. Kepada salah satu awak media yang bertanya soal hal itu, Ahok meninggikan suaranya:

“...Anda bilang kami melanggar HAM, anda ini pengamat pinter-pinter aja, semalam saya juga dengar di TV One luar biasa sekali fitnahnya itu, memberitakan kami telah membuat sumur resapan dengan dana RP 1,2 miliar, mereka dapat data dari mana?”

“...Semua jalan inspeksi sungai di dudukin, gimana kita mau menggali sungai? Waktu kita menggaruk orang keluar dari jalan inspeksi 7,5 kilometer. Kamu katakan melanggar HAM, makanya kita kejar membuat rumah susun supaya kamu tinggal di rumah susun. Itupun kamu menolak, mengatakan minta ganti 3 juta. **Nenek lo punya tanah apa?**Jadi persoalan kita disitu, kita berusaha pindahkan orang kasih kulkas, kasih kulkas di bilang melanggar HAM. Jadi kita ini ga jelas yang kamu bela siapa? Jadi silahkan pengamat-pengamat yang kasih kritik kami terima, tapi yang masuk akal gitu loh.”

“Dia nuduh kami sumur resapan 1,2 milliar. Ya tangkap aja kalo gitu. Kita uda buka anggaran, jadi korupsi dari mana? Jadi jangan seolah-olah membangun opini yang hebat gitu loh, kita ada data, semua anggaran kami anda bisa liat di website.”

Wartawan :Semua anggaran di Pemprov Bisa dipertanggung jawabkan?

Ahok: “Anda bisa buka di website sampai lembar ketiga, mana ada provinsi yang lakukan seperti ini, semua gaji saya publikasikan. Jadi itu semua **konyol**, kebakaran bisa saja tambah banyak karena rumah liar makin banyak waktu kita mau **sikat**, melanggar HAM. **Hamburger** yang mau kamu langgar!

Wartawan: Pak Ahok, sebelum anda melakukan aktivitas ini yah, kita cooling down sedikit kalo pagi-pagi pak Ahok semangat membara ini ya?

Ahok: “Bukan membara! Saya marah, terus terang TV One kalo bilang jujur ya, suka mencari-cari alasan juga. Saya ngomong jujur aja kalo gitu, saya tidak suka di politisi. Dan walaupun saya orang politik, saya tidak peduli nama baik saya mau kerja saja.kalo anda tidak senang anda tidak usah pilih kami lagi, anda cari lagi orang yang mau kerja keras, tapi sekarang biarkan kami kerja, anda awasi, anda kasih masukan.

Wartawan: Kita santai dulu ya Pak Ahok, selama setahun bapak memimpin Ibu Kota DKI Jakarta, kira-kira bahasa betawi ini sudah jago belum pak? Coba dong pak sapa pemirsa TV One. Logat betawinya pak

Ahok: “Saya kira tidak usah seperti itu. Logat betawi macam-macam, anda mau pilih logat betawi yang mana. Kalo Tanah Abang mirip melayu, “masi pakai kemane,” jadi anda mau tiru yang mana. Saya kira tidak perlulah begitu.”

Dari argumen tersebut Ahok terlihat geram karena pertanyaan Reporter TV One melakukan pertanyaan ulangan mengenai transparansi sumur resapan sebesar 1,2 miliar terindikasi korupsi dan Ahok menjawabnya bahwa semua anggaran sudah transparansi bahkan gajinya bisa di cek di website Pemprov DKI. Namun reporter tersebut menanyakan pertanyaan yang sama untuk kedua kalinya “Apakah *Semua anggaran di Pemprov Bisa dipertanggung jawabkan?*” Ahok kembali menjawab namun kali ini ia menaikkan intonasinya menyarankan reporter tersebut mengecek sendiri melalui website. Walaupun sedang melakukan live, Ahok secara terbuka melontarkan kritik tajamnya bahwa TV One melakukan politisasi. Kontennya tidak *fair* dan menggiring opini untuk menjatuhkan citra Pemprov DKI dengan melakukan pelanggaran HAM terkait relokasi tanpa berdasarkan data akurat hal tersebut terlihat dari nada kekesalannya. Argumen dimaksud diucapkan untuk penekanan kalimat “*TV One kalo bilang jujur ya, suka mencari-cari alasan juga. Saya ngomong jujur aja kalo gitu, saya tidak suka di politisi.*”

Melalui kritiknya kepada media, Ahok dengan gayanya yang meledak-ledak menggunakan kata-kata yang lugas melontarkan kata “fitnah” terhadap apa yang diberitakan TV One, kata “fitnah: memiliki makna perkataan tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud merusak reputasi seseorang. Terlihat kekesalan Ahok dengan TV One sudah memuncak sewaktu Reporter mencoba mencairkan suasana dengan mengajak Ahok menyapa netizen

menggunakan bahasa betawi. Namun Ahok yang sudah terlanjur berang, ia menolak permintaan Reporter tersebut dan segera menyudahi wawancara tersebut. Penggunaan kalimat konotasi negatif juga terlihat saat ia menyampaikan di media, seperti kata “*nenek lu punya tanah apa?*”, “*kita mau sikat*”, “*Hamburger yang mau kamu dilanggar.*”

Pada tahun 2015 Ahok kembali mengkritik kepada salah satu reporter TV One perihal kisruh antara Pemprov DKI dan DPRD Jakarta terkait pembahasan APBD. Basuki memperingatkan secara lugas agar TV One “hati-hati” tidak mengambil kesempatan menanyakan pertanyaan titipan hal tersebut dikatakan Ahok karena reporter TV One kerap kali melakukan pertanyaan yang diulang-ulang dan memaksa sehingga narasumber merasa risih. Ungkapan kekesalan tersebut dilontarkan Ahok saat melakukan doorstep di Balai Kota Jakarta:

“Sekarang terbuka toh, itu namanya jebakan Batman ala ahok, sekarang DPRD tidak bisa kamu yang ngetik..kamu yang ngetik (SKPD), sekarang DPRD uda terang-terangan ini versi kami ini yang asli katanya, ini yang palsu jadi itu yang menarik gitu loh. Jadi DPRD sudah berani mengakui versi dia karena dia buat angket buat menekan kami. TV One juga hati-hati juga, gausah cari-cari, pertanyaan-pertanyaan dititipin aku juga sebal dengan TV One makanya aku ga mau hadir (Youtube, 2015).

Dari *scene* di atas makna dan tujuan dari kritikan Ahok kepada Media TV One adalah ingin mengajak netizen berpikir cerdas, kritis terhadap berita yang disampaikan media nasional agar terhindar dari *hoax* atau opini sesat dan meminta TV One tidak hanya mengeluarkan opini namun berita yang disampaikan seharusnya berimbang dengan berdasarkan data. Karena Pemprov sendiri sudah melakukan transparansi data yang di unggah ke website sehingga bisa dicek

kebenarannya. Serta ingin menegaskan bahwa media yang selama ini memojokkan Pemprov DKI yang disebut melakukan pelanggaran HAM saat merelokasi itu tidaklah benar karena Pemprov juga memberikan fasilitas penunjang kepada penghuni rusun yang direlokasi.

4.4.5 Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama Terhadap Masyarakat

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mempunyai kewajiban membenahi Kota Jakarta sesuai dengan janji kampanya “Jakarta Baru”, sewaktu mendampingi Joko Widodo yang sekarang sudah diusung masyarakat menjadi Presiden Republik Indonesia. Melakukan revolusi kebijakan sering mendapat pro dan kontra di masyarakat terutama kebijakan Reklamasi Pulau di Jakarta dan Relokasi PKL Tanah Abang untuk menertibkan warga yang suka berjualan di pinggir jalan sehingga membuat macet arus lalu lintas.

Meski belum genap 3 tahun menjabat namun sudah banyak programnya yang sudah berjalan. Ahok aktif memberikan tanggapan-tanggapan terkait isu-isu dalam pemerintahan yang sedang dijalankannya sebagai bentuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui media. Ruang lingkup Gubernur tidak hanya menata ruangan, tetapi juga menata wilayah darat dan air. Tentunya wewenang ini harus memberikan manfaat bagi rakyat

Salah satunya mengenai relokasi PKL (Pedagang Kaki Lima). Pihak yang setuju, melihat PKL sebagai penggerak perekonomian kota dan sebagai upaya untuk menyerap lapangan pekerjaan serta menyediakan kebutuhan baik barang dan makanan murah dan mudah dijangkau masyarakat. Di sisi lain, PKL

dipandang sebagai penyakit kota. Keberadaan mereka di fasilitas umum dan fasilitas sosial dinilai merusak estetika kota. Untuk itu Ahok dituntut kritis menanggapi dan memberikan argumen. Hal tersebut sempat disinggung saat Ahok diundang menjadi Narasumber Kick Andy, dalam Acara Metro TV pada tanggal 5 Februari 2016. Dalam penyampaian argumennya Ahok terlihat santai namun sesekali nadanya meninggi dan menekan yang memang menjadi ciri khas Ahok saat beradu argumentasi dengan lawan bicaranya:

“Pemprov DKI sekarang sedang menyiapkan tempat dagang buat para PKL termasuk modal kerja. Kita menyiapkan dari pemerintah pusat kurs 9%, kami 12%, dan 1% perbulan. Kita siapkan 1 Triliun untuk biayain 100.000 PKL, yang terkumpul berapa? Cuma 20.000, mereka ga mau kumpul. Kenapa yang suka ribut itu itu yang nyewain lapak, atas nama paguyuban, persatuan. Kamu kalo jual-jual lapak, *gue penjaraan lu!* Jadi sebenarnya penyewa lapaknya yang saya marahi bukan PKLnya”.

(Sumber Dokumentasi: Kick Andy, Kontroversi Ahok,2016)

Dalam mengungkapkan argumen politiknya mengenai kebijakan Relokasi PKL Pemilihan kata-kata saat berargumen juga berperan penting agar pesan-pesan yang disampaikan tepat sasaran. Dalam argumennya Ahok mengungkapkan kekesalannya kepada penyewa lapak terlihat dalam penggunaan kata “*gue*”, “*lu*” untuk menyebut para preman-preman yang kerap menarik setoran dari PKL. Dan penggunaan kata “*penjarakan*”, tidak kalah provokatif. Ahok ingin menunjukkan akan menindak tegas para penyewa lapak. Hal ini didasari adanya aksi ataupun tuntutan kepada Ahok yang menggunakan atas nama paguyuban atau persatuan.

Pada tanggal 5 Februari 2016 Basuki saat diwawancari di Kick Andy mengenai kebijakannya untuk merelokasi PKL dianggap kontroversi. Tujuan

(motif) dari tindakannya menegaskan perlunya penataan/relokasi PKL karena dinilai mengganggu ketertiban umum dan menggunakan lahan yang sejatinya sebagai fasilitas umum. Selain itu Pemprov DKI juga menawarkan solusi dengan menyiapkan tempat dagang yang layak dan tertata. Seperti pembangunan pasar IRTI Monas yang dikonsepsikan seperti 129 kios-kios dan 210 gerobak. Dalam argumennya Ahok mengatakan Pemprov DKI sendiri sudah membuat APBN 1 Triliun untuk 100.000 PKL. Alurnya para PKL harus sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Bank DKI sebagai iuran menghindari membayar sewa kepada oknum-oknum yang melakukan pungli dan preman adalah menindak oknum-oknum penyewa lapak.

Tindak tegas yang dilakukan terbukti terhadap pelaku pungli, razia yang dilakukan Satpol PP dengan menangkap preman-preman yang melakukan operasi di tanah abang. Masalah penertiban PKL ini bukan hal baru yang ditangani Ahok, Jika dilihat kebelakang pada awal pemerintahan Ahok sudah sejatinya berani memerangi PKL liar dan Preman-preman yang melakukan pungutan liar. Bahkan dengan vokal mengatakan akan menggunakan strategi dengan istilah “*cara koboi*” dalam argumennya saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 11 Juni 2014.

“Saya menganggap PKL ini sudah *out of the rule*. Kami juga pakai cara koboi untuk mengatasi mereka. Kayak di film-film Godfather, Chicago. Makanya kita bentuk pasukan penjambret. Habis kita mau minta tolong sama siapa?(Dokumentasi Vivanews,2014)kata Ahok sedikit gamang

”Yang penting jangan anarkis. Jangan melanggar HAM. Nanti Komnas HAM bilang lagi, kita melanggar HAM. Jadi rusak nih

negara, karena terlalu banyak membela orang yang salah”
(Santosa,2015,h.231)

Upaya penertiban PKL di Tanah Abang oleh Ahok menuai kecaman dari berbagai paguyuban, persetujuan dengan paguyuban sebelumnya sudah pernah terjadi pada tahun 2013. Bermula ketika Haji Lulung menyerang Ahok yang dinilai bicara sembarangan soal PKL Tanah Abang. Lulung selama ini dikenal sebagai tokoh di Tanah Abang dan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan agar Ahok harus diperiksa kesehatan jiwanya karena melontarkan ucapan sembarangan bahwa ada oknum DPRD yang berperan menggerakkan massa di Tanah Abang. Ucapan Ahok terkadang memang tidak sebatas kritik atau teguran. Ia tak jarang menuduh, mengecam, bahkan menantang. Kata-kata Ahok terkadang tak lembut, mengindahkan sopan santun. Sikap inilah yang membakar emosi Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana (Santosa,2015,h.188)

Ahok menjawab, sekelompok pengunjung rasa yang menamakan dirinya Rakyat Jahit Mulut Ahok (Rajjam Ahok). Mereka memperkarakan bicara Ahok yang selama ini keras, khususnya tudingan tentang oknum DPRD dan preman-preman yang mem-backing PKL Tanah Abang. Hal tersebut ditayangkan melalui youtube dengan judul “Ahok VS Lulung”:

Ketua Umum Forum Betawi Bersatu:“Saya sikapi bersama teman-teman bukan hanya persoalan PKL dan Haji Lulung, namun juga masalah gaya bapak memimpin Jakarta. Gaya-gaya bapak ini sangat menyakiti masyarakat Jakarta, *statement-statement* bapak tidak menunjukkan sebagai pejabat publik. *Statement* yang menurut saya tidak layak dilakukan di media terbuka. Bapak sebagai pejabat seharusnya mampu menunjukkan intelektual dan bersantun ria.”
Ucap Rahmat, Ketua Umum Forum Betawi Bersatu

Pengunjuk rasa: “Saya sadar bapak adalah seorang pemimpin, dan kami sebagai rakyat mendukung bapak, apabila ada perda/program-program yang bapak jalankan. Saran ke bapak kalau ngomong-hati-hati, mungkin maksud bapak baik ngomong preman, anarkis secara hukum itu betul. Tapi bapak sebagai pejabat ada baiknya menjaga omongan. Bapak boleh turun bersihin tanah abang tapi sebelumnya komunikasi kepada warga, tokoh-tokoh figur” Kata salah satu peserta yang tergabung dalam paguyuban menengahi pembicaraan

Ahok: “Saya taat konstitusi bukan konstituen, tapi Jakarta anda lakukan apa saja akan menyenggol orang karena begitu banyak kepentingan. Tapi coba pikirkan baik-baik pernah tidak dalam sejarah tanah abang blok tanah abang dibagikan secara gratis. Kenapa PKL toko yang baik dan layak tidak bisa masuk karena kalian kasih harga 20 tahun di muka. Kami lagi bangun pasar, retribusi harian, tidak disewakan, tapi anda tidak boleh curang, cucu anda juga tidak boleh dapat warisan kalau tidak Jakarta ini dikuasai orang kaya semua. Saya mengerti sekali semua PKL itu pengen di pinggir jalan.” Kata Ahok dengan Tenang (Pemprov DKI Jakarta, 30 Juli 2013)

Akhir dalam diskusi tersebut, Ahok juga menolak meminta maaf, sebagaimana yang diklaim orang-orang Rajjam Ahok, “mereka meminta saya meminta maaf karena menganggap Haji Lulung tolol. Saya Bilang, saya enggak pernah menganggap Haji Lulung tolol. Saya hanya mengatakan kalau sampai ada anggota DPRD tidak mengerti Perda berarti baru tolol. Pak Haji Lulung kan mengerti Perda, berarti dia tidak tolol dong” (Santosa,2015,h.191)

Melalui Argumen yang dilontarkannya saat forum diskusi dengan tokoh-tokoh betawi tersebut terlihat bahwa Ahok (*agent*) tujuan dari menata PKL dengan cara melakukan relokasinya yaitu *pertama*, sebagai upaya untuk menghindari praktek premanisme yang diduga banyak dilakukan pungli oleh penguasa Tanah Abang termasuk di-*backup* oleh berbagai kepentingan kelompok-kelompok tertentu. *Kedua*, sebagai upaya penegakan peraturan daerah yang dinilai mengganggu ketertiban umum dan menggunakan lahan sejatinya sebagai fasilitas

umum namun digunakan oleh pedagang-pedagang yang selama ini mangkal di sepanjang ruas jalan. Sikap (*attitude*) dibalik itu yang ingin ia tunjukkan bahwa ia konsisten tidak melayani kepentingan konstituen yang melawan, bersebrangan atau tak sejalan dengan kebijakan publik.

Lain halnya dengan Penataan PKL, selanjutnya mengenai argumen kritis Ahok dalam menanggapi pihak yang kontra terhadap kebijakan Reklamasi yang mencuat ke publik. Reklamasi sejatinya dilakukan dengan bertujuan perbaikan dan pemulihan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lahan baik dan bermanfaat. Hal itulah yang menjadi dasar argumen Ahok untuk memperbaiki kawasan pesisir teluk Jakarta yang dianggap masih kumuh, kotor dan juga tidak terawat dengan vokal Ahok mengatakan bahwa 100% hasil reklamasi, sertifikatnya menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok menjanjikan tidak akan memberikan sertifikat hasil reklamasi kepada pihak swasta.

“Itu reklamasi tidak menyingkirkan Nelayan, itu kan laut yang memang kotor, dan cara reklamasi dibuatkan pulau dan jaraknya masing-masing pulau jarak 300M jadi kapal tidak bisa lewat, semua hasil reklamasi 100 % sertifikat atas nama DKI, 40% yang bisa dijual, 5% gross juga milik DKI. Salahnya dimana pak? lagipula izin ini bukan saya yang keluarkan, tapi zaman Pak Harto tahun 1995. Orang ini juga suka salah, izin 17 pulau dikeluarkan tahun 1995 waktu dia minta izin-izin yang lain (Zaman pak Ali sadikin), saya justru minta memperjuangkan keuntungan DKI supaya lebih besar. Salahnya dimana? Saya juga ga ngerti? Merusak lingkungan bagaimana? Lautnya aja sudah kotor begitu, ga ada yang cari ikan disitu pingsan makan logam berat, kalo 300M ketemu ikan pasti sudah kaya sepeti di Belitung.

(Sumber Dokumentasi: Kick Andy, Kontroversi Ahok, 2016)

Berbagai argumen maupun sanggahan terkait kebijakannya melakukan Reklamasi dan Relokasi PKL yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada saat melakukan dialog interaktif, maupun talkshow di televisi. Tidak lain tujuannya memberikan pemahaman bahwa pembangunan pada akhirnya harus bisa dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat dan mensejahterakan rakyat. Jika ditelaah argumen yang disampaikan Ahok sangat lugas, bahasanya tidak bersayap namun tetap memberi penekanan.

Ahok dalam mata najwa memberikan argumen yang kritis dan disertai bukti riil dan seringkali menggunakan kata-kata lugas dan tanpa basa-basi dan bahkan tajam. Kata demi kata yang dilontarkannya di hadapan media. Dalam beberapa kesempatan, Ahok menggunakan kata-kata yang lebih tajam dan kritis untuk mengonseptualkan realitas, Contohnya pada penggunaan kata "*Haram*" daripada "*tidak bisa dilakukan*" sebagai kata denotasi yang mengonseptualkan realitas bahwa relokasi tersebut benar-benar tidak bisa dilakukan, namun argumen yang dilontarkan Ahok cenderung sinisme "ya kita akan banding", "karena dia mengatakan reklamasi ini seolah-olah haram" yang dimaksudkan untuk menyindir, atau menyinggung seseorang atau sesuatu untuk mengekspresikan rasa kesal namun dalam konteks humor, karena nada yang ditunjukkan Ahok sambil tertawa tetapi tetap melakukan penekanan.

"Ya kita akan banding, kenapa? Ya karna dia mengatakan reklamasi ini seolah-olah haram. Saya mau tanya? Kalau 50 Tahun yang akan datang tidak reklamasi kelaparan dunia!. Karena tidak cukup tanah lagi, kalo soal pelanggaran lingkungan ya kita selesaikan secara teknis."

(Sumber Dokumentasi: Mata Natjwa, Semua Karna Ahok,2016)

Argumen kedua yang dilontarkan Ahok masih dengan topik reklamasi, melalui acara Kick Andy pada 5 Februari 2016. Ahok memberikan argumen terkait kebijakan reklamasi dinilai pro orang-orang kaya karena nelayan tersingkir. Sebagai sanggahannya Ahok mengungkapkan “lautnya aja sudah kotor begitu”, “cari ikan disitu pingsan makan logam”. Menunjukkan kata denotasi untuk menggambarkan situasi yang sedang terjadi. Ahok menunjukkan realitas menggunakan sindiran dengan tujuan menghaluskan bahasa agar tetap terlihat sopan. Namun tujuannya (motif) dari argumen Ahok sendiri adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa reklamasi sebagai solusi untuk merevitalisasi kawasan laut yang rusak menjadi lebih bermanfaat mengingat meningkatnya jumlah penduduk kota Jakarta secara pesat dengan kebutuhan meningkat tetapi keterbatasan lahan.

“Itu reklamasi tidak menyingkirkan Nelayan, itu kan laut yang memang kotor, dan cara reklamasi dibuatkan pulau dan jaraknya masing-masing pulau jarak 300M jadi kapal tidak bisa lewat, semua hasil reklamasi 100 % sertifikat atas nama DKI, 40% yang bisa dijual, 5% gross juga milik DKI. Salahnya dimana pak? lagipula izin ini bukan saya yang keluarkan, tapi zaman Pak Harto tahun 1995. Orang ini juga suka salah, izin 17 pulau dikeluarkan tahun 1995 waktu dia minta izin-izin yang lain (Zaman pak Ali sadikin), saya justru minta memperjuangkan keuntungan DKI supaya lebih besar. Salahnya dimana? Saya juga ga ngerti? Merusak lingkungan bagaimana? Lautnya aja sudah kotor begitu, ga ada yang cari ikan disitu pingsan makan logam berat, kalo 300M ketemu ikan pasti sudah kaya seperti di Belitung.

Tidak hanya mengenai pungli, Ahok juga kerap menanggapi kebijakan pemberian izin melakukan reklamasi di DKI Jakarta, tentu banyak pihak seperti

pemerhati lingkungan hidup yang kontra kepadanya karna dianggap pro pada konglomerat. Namun Ahok menegaskan bahwa melakukan reklamasi tersebut adalah untuk kepentingan publik bukan semata-mata untuk memperkaya pengembang. Agar tidak dianggap hanya sekedar Asbun (asal bunyi), Ahok sebagai komunikator yang cerdas, memaparkan secara logis melalui argumennya pada saat diundang di Kick Andy pada tanggal 5 Februari 2016.

“Sepanjang 300M Pulau G dari daratan lautnya sudah tercemar limbah, sampah, sehingga kapal tidak bisa singgah, dan sangat tidak memungkinkan kepada Nelayan untuk menjaring ikan disekitar laut tersebut karna Ikan diduga mengandung logam berat sehingga sangat berbahaya jika dikonsumsi”

“Ditegaskan kembali hasil reklamasi 100% sertifikat atas nama DKI, dan izin tersebut memang sudah keluar sejak zaman Pak Harto tahun 1995”. (Sumber Dokumentasi: Kick Andy, Kontroversi Ahok, 2016)

Dalam argumennya Ahok menjelaskan bahwa pemberian izin reklamasi bukan suatu hal yang baru bahkan sudah pada zaman Pak Harto. Izin reklamasi merupakan memperjuangkan keuntungan DKI. Topiknya masih sama pada argumen yang sebelumnya ditayangkan di Mata Najwa pada 16 Juni 2016. Najwa Sihab kembali menanyakan sikap yang akan diambil Ahok mengenai kebijakannya untuk melakukan Reklamasi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan Pulau G tidak bisa di Reklamasi karena gugatan oleh warga dinilai merusak lingkungan dan melawan hukum. Berikut ini argumen Basuki Tjahaja Purnama saat menjawab pertanyaan dari Najwa Sihab.

“Ya kita akan banding, karna 50 tahun yang akan datang jika tidak direklamasi maka seluruh dunia akan kelaparan karena tidak akan cukup tanah lagi, jika pelanggaran lingkungan, kita akan atasi secara teknis. Korea Selatan melakukan reklamasi untuk mengatasi ladang

gandum, karena ia mengatasi kekurangan pangan yang akan datang, lalu Singapura, Abu Dhabi, Hongkong, China, Belanda, Eropa. Jadi yang diributkan reklamasi lingkungan saat ini sudah diributkan 50 Tahun lalu di Belanda”.

(Sumber Dokumentasi: Mata Najwa, Semua Karna Ahok, 2016)

Melalui argumen di atas secara eksplisit meminta masyarakat untuk lebih kritis berpikir jauh ke depan. Memang hasil reklamasi yang akan dilakukan sekarang memang tidak bisa langsung dinikmati namun akan menjadi aset generasi selanjutnya karena semakin cepatnya lonjakan jumlah manusia, kebutuhan akan lahan pun semakin meningkat. Untuk itu Ahok juga menyarankan masyarakat untuk mencoba berkaca dengan Negara maju seperti Singapura, Abu Dhabi, Hongkong, dan bahkan sebagian besar lahan di Belanda adalah hasil reklamasi yang dipergunakan untuk menanam gandum.